



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**L
A
K
I
P**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : Januari 2025

**Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka**



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang ditetapkan, sebagaimana pada Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretaris yang membawahi 21 Sub Bagian, dan 1 Fungsional
- c. Bidang terdiri dari 3 Bidang, masing-masing bidang membawahi 2 Fungsional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui

Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama : Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat;
2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Sasaran Ketiga : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bangka Tahun 2024 termasuk berhasil dengan kategori baik.

2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 1 (satu) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori sangat baik (sebesar $\geq 90\%$) sedangkan 1 (satu) indikator dengan kategori sedang.
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
 - c. Penambahan SDM pada Badan Kesbangpol Khususnya Inteligen dalam mengumpulkan informasi dan isu-isu yang berkembang dimasyarakat.
 - d. Adanya ketersediaan anggaran dalam menunjang sasaran yang telah ditetapkan.
 - e. Meningkatkan kerjasama dengan OPD terkait dalam deteksi dini, cegah dini potensi konflik.

Adapun Kegagalan pada beberapa indikator yang belum tercapai pada indikator Renja 2024 tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh buruknya kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, namun lebih disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Terjadinya Rasionalisasi Anggaran yang membuat pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tunda pelaksanaannya pada tahun yang akan datang.
2. Terjadinya Efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang telah direncanakan.
3. Sikap apatis masyarakat untuk berpartisipasi memberikan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilukada Serentak di Kabupaten Bangka, namun hal ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor.

Demikian gambaran pelaksanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2024 yang secara lengkap capaian diatas akan diuraikan dalam dokumen ini. Capaian tersebut menggambarkan komitmen jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya diperlukan kesinambungan dan komitmen serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	3
Daftar Lampiran	4
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	9
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	13
1.3 Isu - Isu Strategis	24
1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran	26
1.5 Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	31
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
2.1 Visi dan Misi Tujuan, Sasaran dan Kinerja OPD	35
2.1.1 Visi dan Misi Badan Kesbangpol	35
2.1.2 Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	36
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Startegis beserta Indikator Kinerja Utama	36
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Kab. Bangka	37
2.2.1 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangka	37
2.2.2 Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangka	37
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	38
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024	42
2.4.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	42
2.4.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43
2.4.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	45
2.4.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2024	46
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
1. Analisis capaian Kinerja terhadap Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	53
2. Analisis Capaian Kinerja terhadap Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	56
3. Analisis Capaian Kinerja terhadap Realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah menengah dalam Renstra	69
4. Analisis Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	70
5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi	70
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	73
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja	76
B. REALISASI ANGGARAN	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.4	Daftar Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan.....	26
1.5	Daftar Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Eselon tahun 2024	26
1.6	Daftar Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Tahun 2024	27
1.7	Daftar Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jenjang Pendidikan.....	27
1.8	Daftar Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Golongan.....	27
1.9	Daftar Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jabatan.....	28
1.10	Daftar Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jenjang Pendidikan	28
1.11	Daftar Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin	28
1.12	Daftar Aset / sarana dan Prasarana dan Kondisinya	29
1.13	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	31
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka 2024-2026	36
2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38
2.3	Struktur Program dan Kegiatan terkait langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	40
2.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	41
2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	42
2.6	Indikator Kinerja Utama	44
2.7	Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.....	45
2.8	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	46
2.9	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.....	48
2.10	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.....	49
2.11	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.....	49
2.12	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	50
2.13	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.....	50
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	52
3.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	53
3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	56
3.5	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra	69
3.6	Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran	76
3.7	Belanja Tidak Langsung.....	88
3.8	Belanja Langsung.....	90

DAFTAR GAMBAR



1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.....	10
1.2	Cascading Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026.....	11
1.3	Peta Jabatan Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka	23

DAFTAR LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024	134
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024	173
3. SOP Perencanaan Kinerja	217
4. SOP Hibah Parpol, KPU dan Bawalu, TNI Polri	224
5. SOP Izin Penelitian	230
6. Tabel Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2024	231

Pendahuluan**A. Latar Belakang****1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
- k. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka selama tahun anggaran 2024.

Tujuan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instransi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

Adapun sistematika LAKIP sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang : Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Tugas, Fungsi Pokok Fungsi dan sistematika penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat daerah
- B. Gambaran Umum Organisasi
Penjelasan Umum Organisasi yang menjelaskan Fungsi dan Kewenangan serta Struktur Organisasi dengan dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN :

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain – lain yang dianggap perlu

1. Perjanjian Kinerja Induk dan Perubahan
2. Dokumen Lain yang dianggap perlu

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan instansi pemerintah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang dan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

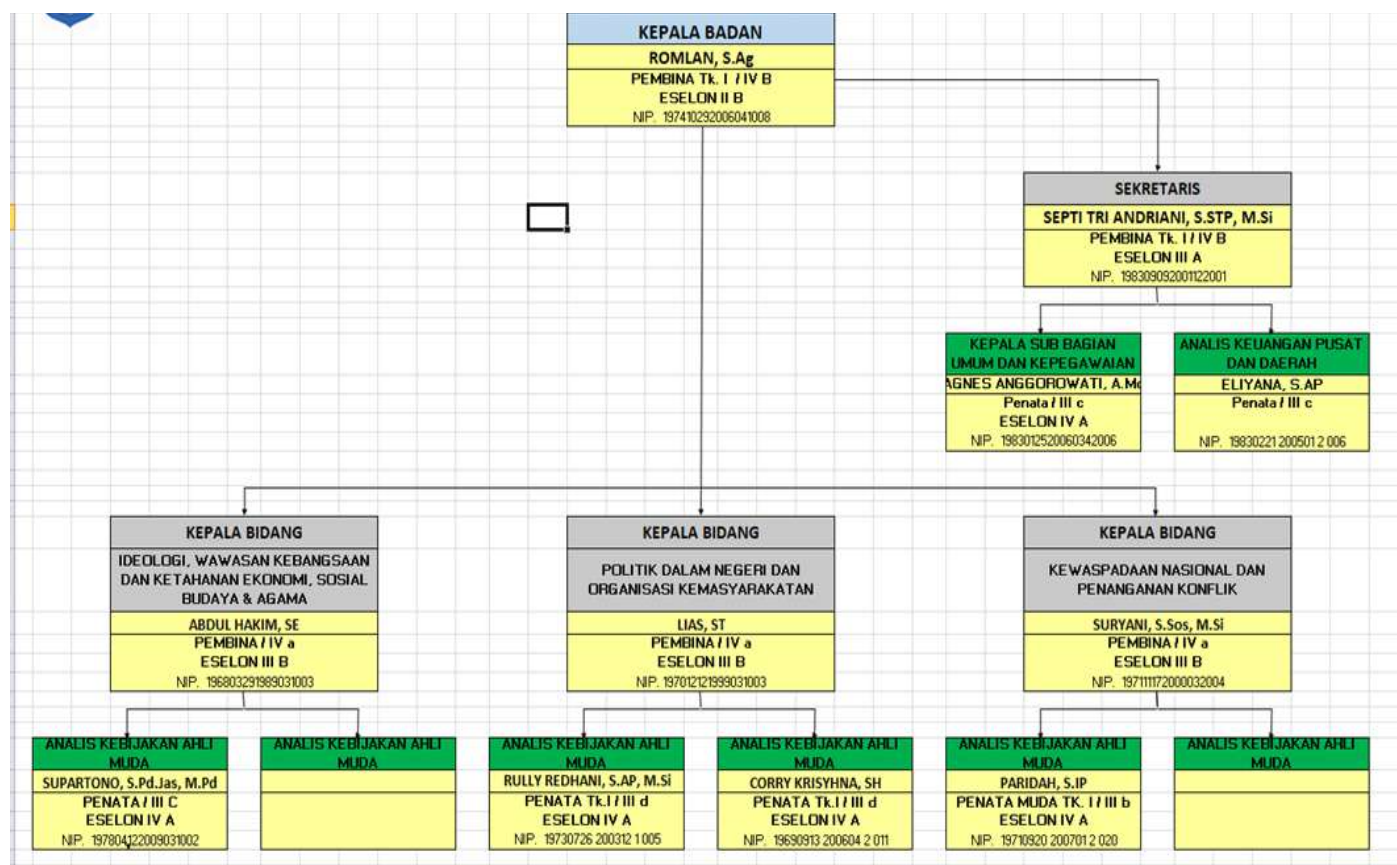
Adapun susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka guna melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi;
 1. Sekretaris;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. Hubungan antara cascading kinerja, dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Bagan 1.1
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka



LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN STRATEGIS

Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat
Indikator Sasaran Strategi : Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial

Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Koordinasi terhadap Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	Persentase Cakupan Desa/Kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek Bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penguatan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penguatan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penguatan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Forum Koordinasi Pengkajian Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek Bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penguatan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penguatan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penguatan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengkajian Daerah Kabupaten/Kota

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN RPD

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat

Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik

Persentase pemilih pemula disatukan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik

Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat

Persentase Ormas yang aktif

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol

Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol

Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula

Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan

Persentase Organisasi kemasyarakatan yang dibina dan diawasi

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan Sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) dan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka No. 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tipe B, tugas Fungsi dan Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Badan Kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi

- organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Penjabaran Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor : 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tipe B terdiri dari :

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Kepala Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis DiBidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - b. Penyelenggaraan Kebijakan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

- c. Penyelenggaraan Koordinasi Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- d. Penyelenggaraan Pementauan, Evaluasi Dan Pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- e. Penyelenggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f. Penyelenggaran Administrasi Badan; Dan
- g. Penyelenggaran Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaran dan pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
- f. Penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan uraian tugas terdiri atas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;

f. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;

h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;

- i. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- j. mengendalikan arsip aktif
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Wilayah Kabupaten;
2. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

- Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Wilayah Kabupaten
3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Wilayah Kabupaten;
 4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Wilayah Kabupaten;
 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Wilayah Kabupaten; Dan
 6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Badan. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendidikan politik,

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) asing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Bupati, Pemantauan Situasi Politik Serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Asing Di Wilayah Kabupaten;
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Bupati, Pemantauan Situasi Politik Serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dan organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Asing Di Wilayah Kabupaten;

3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Bupati, Pemantauan Situasi Politik Serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Asing Di Wilayah Kabupaten;
4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Bupati, Pemantauan Situasi Politik Serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Asing Di Wilayah Kabupaten;
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Bupati, Pemantauan Situasi Politik Serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Asing Di Wilayah Kabupaten; Dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Badan.
Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

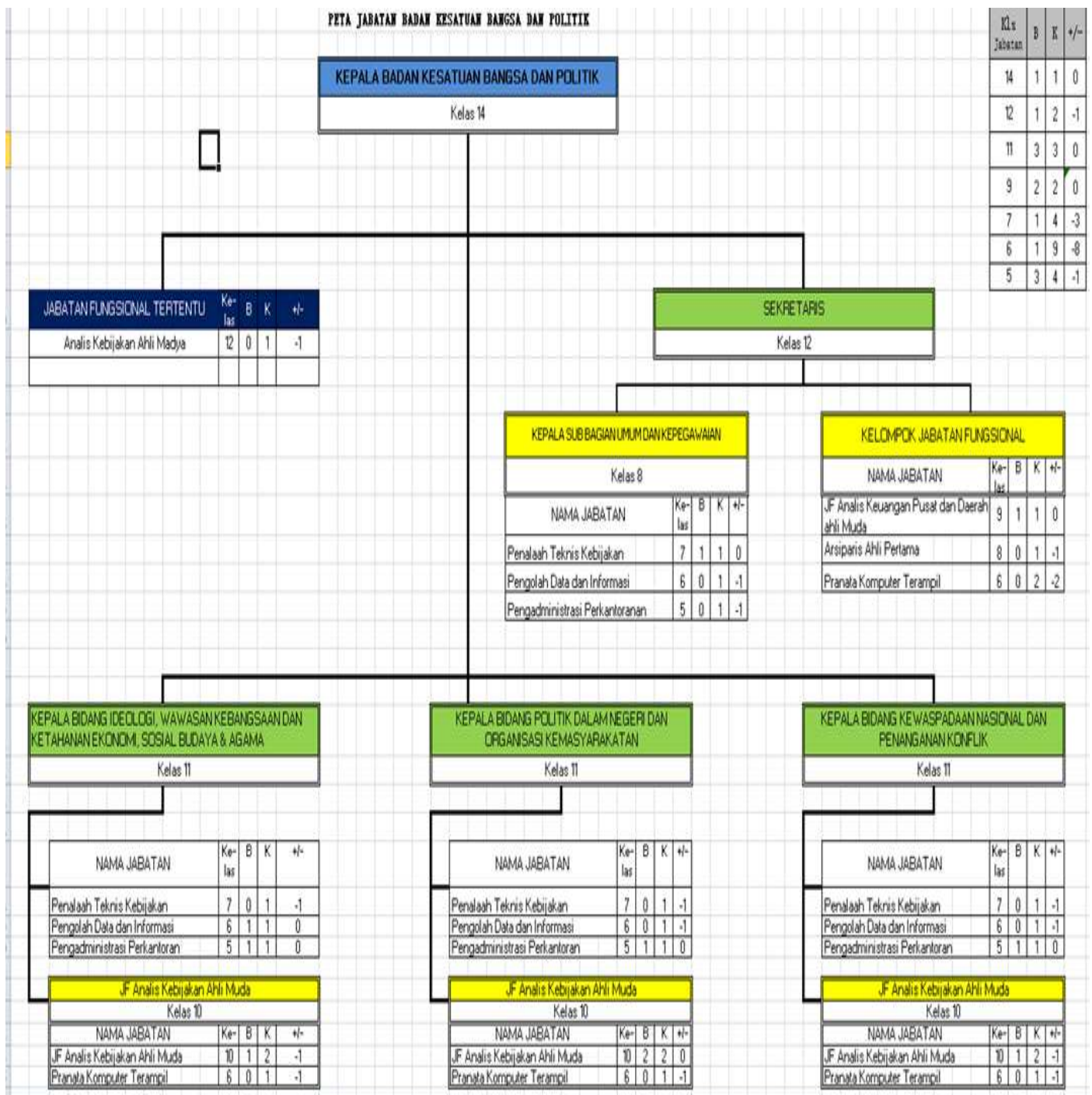
1. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah Kabupaten;
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah Kabupaten;
3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah Kabupaten;
4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah Kabupaten;

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik Di Wilayah Kabupaten; Dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Badan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
4. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
5. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.3
Peta Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka



1.3 Isu-Isu Strategis

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka periode 2024-2026 berdasarkan dinamika sosial politik yang berkembang di Kabupaten Bangka, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam tiga tahun kedepan yaitu :

1. Isu Ideologi dan Kebangsaan yang terdiri dari :
 - a. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di semua elemen Masyarakat
 - b. Rendahnya pemahaman tujuan 4 Pilar Wawasan Kebangsaan di kalangan generasi muda
 - c. Rendahnya rasa nasionalisme dan kebangsaan para generasi muda yang disebabkan derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing sehingga telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan.
 - d. Masih kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah
 - e. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Para Generasi Muda mengenai Bahaya Narkotika

- f. Masuknya Budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
2. Isu Kondisi Politik dan Demokrasi yaitu
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
 - b. Kurangnya Pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi
 - c. Masih kurangnya masyarakat yang memahami kebijakan politik
 - d. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
 - e. Masih adanya ormas dan LSM yang belum terdata
3. Isu Kondisi Kemanan dan ketertiban yaitu
 - a. Penambangan Ilegal terjadinya Konflik Perebutan Kepemilikan Lahan Penambangan dan Rusaknya Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
 - b. Maraknya Penggunaan Media Informasi dalam Penyebaran berita Hoak di masyarakat yang dapat menimbulkan keamanan dan keresahan di masyarakat.
4. Isu Konflik dan Toleransi

Masih adanya penolakan pendirian rumah ibadah yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama, maupun sentiment agama yang dapat mengarah pada konflik sosial serta berkembangnya radikalisme di kalangan masyarakat.

Sedangkan isu - isu strategis yang berkembang saat ini di Kabupaten Bangka yaitu :

 1. Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap instansi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yaitu adanya konflik terhadap ketidakpercayaan masyarakat pada hasil perhitungan suara legislatif pada Pemilu 2024.
 2. Rendahnya Partisipasi Pemilih pada pilkada 2024
 3. Masih terjadinya berbagai permasalahan politik dalam pelaksanaan pemilu/pilkada seperti Netralitas ASN dan Politik Identitas, Money Politik dan lain sebagainya.
 4. Adanya isu money politik untuk memenangkan salah satu calon legislatif.
 5. Berkembangnya Radikalisme di kalangan satuan pendidikan dan Narapidana Terorisme

6. Berkembangnya Penyalahgunaan Narkotika
7. Terjadinya sengketa lahan

1.4 Dukungan SDM, sarana dan Parasana dan Anggaran

1.4.1 Dukungan SDM (Sumber Daya Manusia)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya aparatur yang berjumlah 33 Orang terdiri dari 16 orang PNS dan 17 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah dan komposisi pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel berikut:

Berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan
Pangkat/Golongan Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat /Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGARA		
1	Kepala Badan	Pembina TK I/IV B	1 orang
2	Sekretaris	Pembina TK I/ IV B	3 orang
3	Kepala Bidang	Pembina IV/A	3 orang
3	Kepala Sub Bagian	Penata /III c	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata /III c Penata TK I/III d Pembina / IV a	3 orang 1 orang 1 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	Pengatur TK I Penata Muda/IIIa Penata Muda TK /IIIb Penata/III c	1 orang 2 orang 1 orang 1 orang

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Eselon Tahun 2024

No.	Eselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1.	II	1				1	
2.	III	-	1	2	1	4	
3.	IV		1			1	
	Jumlah	1	2	2	1	6	

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Tahun 2024

No .	Sekretariat/Bidang	PNS			PHL			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Sekretariat.	2	4	6	2	8	10	16
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	2	1	3	3	1	4	7
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	2	1	3	0	2	2	5
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2	2	4	1	0	1	5
	Jumlah	8	8	16	6	11	17	33

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2	2	4
2.	S1	0	4	4
3.	D3	-	2	2
4.	SLTA	3	-	3

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Golongan Tahun 2024

NO	Golongan	A	B	C	D	JUMLAH
1	I	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	1	1
3	III	2	1	5	1	9
4	IV	4	2	-	-	6
	Jumlah					16

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jabatan Tahun 2024

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Struktural	3	3	6
2.	Jabatan Fungsional	2	3	5
3.	Tenaga Teknis Lainnya	-	-	-
4.	Arsiparis	-	-	-
5.	Staf/Administrasi/tata Usaha	-	-	-
	Jumlah	5	6	11

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	-	-	-
2.	S1	4	5	9
3.	D3	-	1	1
4.	SLTA	2	5	7

Tabel 1.11
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN		PEGAWAI YANG ADA		JENISKELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREM PUAN
A	JABATAN STRUKUTRAL	6		6		3	3
1	Kepala Badan	1	S1	1	S1	1	
2	Sekretaris Badan	1	S1	1	S2		1
3	Kepala Bldang	3	S1	3	S1	2	1
4	Kepala Sub Bag Umum	1	D3	1	D3		1
B	JABATAN FUNGSIONAL	7		5		2	3
1	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1	S1	1	S1		1
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	6	S1	2 2	S2 S1	2	2
3	JF Perencana Ahli Muda	1	S1	0	0	0	0
4.	Arsiparis Ahli Pertama	1	S1	0	0	0	0
	Perencana Ahli Pertama	1	S1	0	0	0	0
	Pranata Komputer terampil	5	D3	0	0	0	0
	Arsiparis terampil	1	D3	0	0	0	0
C	JABATAN PELAKSANA	14		5		4	1

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN		PEGAWAI YANG ADA		JENISKELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Penelaah Teknis Kebijakan	2	SI	1	SI		1
2	Pengelola Data dan Informasi	1	D3	1	D3	1	
3	Pengadministrasi Perkantoran	4	SMA	3	SMA	3	
	Penata layanan Operasional	3	S1	0	0	0	0
	Pengelola layanan operasional	1	D3	0	0	0	0
	Operator layanan operasional	3	SMA	0	0	0	0
D	PHL	17		17		7	10
1	Operator Komputer	4	D3/S1	4	D3/S1	1	3
2	Tenaga Administrasi	10	SMA	10	SMA	4	6
2	Tenaga Kebersihan	1	SMA	1	SMA	-	1
3	Penjaga Kantor	1	SMA	1	SI	1	-
4	Supir	1	SMA	1	SMA	1	-

Berdasarkan data pada tabel 1.10 menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka hanya memiliki 16 orang ASN dan 17 Orang PHL dengan total seluruh pegawai berjumlah 33 orang. Sedangkan untuk formasi yang dibutuhkan berdasarkan peta jabatan berjumlah 44 orang sehingga masih terjadi kekurangan pegawai ASN dalam membantu pelaksanaan kelancaran kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka. Selain jumlah ASN yang minim tingkat pendidikan dan kualitas pegawai juga masih relatif rendah sehingga jumlah dan kualitas/mutu SDM yang ada merupakan masalah yang utama dalam meningkatkan kinerja di Badan Kesbangpol.

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Kantor yang dimiliki Badan Kesbangpol dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Daftar Aset/Sarana dan Prasarana dan
Kondisinya Per Desember 2024

NO	JENIS	KONDISI (B/KB/RB)	NILAI
1.	Tanah	1	330.336.000

NO	JENIS	KONDISI (B/KB/RB)	NILAI
2.	Gedung dan Bangunan	1	801.285.000
3.	Bangunan Tempat Tinggal	1	-
4.	Kendaraan	1	381.349.200
5.	Alat-alat kantor/rumah tangga	1	321.748.000
5.	Alat studio dan komunikasi	1	29.300.000
6.	Aset tetap Renovasi (ATR)	1	-
7.	BMD Ekstrakomptabel	1	473.000
8.	Komputer	1	138.050.000
JUMLAH			2.002.581.200,00

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 6.882 M² yang merupakan tanah bangunan gedung.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari dua unit dengan luas 258 M² yang terletak di Jalan ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan Komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Januari 2024 sebanyak 7 unit yang terdiri dari 2 unit Kendaraan roda empat minibus serta 5 unit kendaraan roda dua.

Berdasarkan uraian sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yaitu terdapat kendaraan Dinas roda empat sebanyak 2 unit yaitu kendaraan jabatan Kepala Badan dan Sekretaris dengan kondisi yang kurang baik sehingga perlu dilakukan pengadaan baru. Sedangkan perlengkapan kantor berupa meja, kursi, pendingin ruangan, lemari, filling kabinet, Komputer sudah tersedia dalam kondisi baik walaupun masih terdapat kekurangan. Untuk

Perlengkapan kantor yang masih banyak kekurangan pada personal komputer. Rasio personal Komputer/Laptop yang tersedia dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 6 dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Sedangkan sebanyak 80 % dari Komputer/Laptop yang sudah mengalami penghapusan masih digunakan walaupun dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi untuk digunakan dikarenakan spesifikasinya tidak mendukung dalam pekerjaan yang 90 % menggunakan aplikasi sehingga pekerjaan yang dihasilkan lambat dan tidak tepat waktu.

1.4.3 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Bangka. Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.205.283.448,00 dengan rincian belanja operasi Rp 31,041.998,00 dan belanja modal Rp 285.789.130,00 dan belanja Hibah Rp. 27.072.340,00 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 yang disahkan mulai 14 Oktober 2024, menjadi sebesar Rp. 33.806.315.468,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 31.689.394.4933,00 (yang terdiri dari Rp. 29.372.422.386,00 Anggaran Hibah KPU, Bawaslu dan TNI Polri) dan belanja modal Rp 85,023.050,00, yang mengalami kenaikan yang signifikan yang merupakan anggaran Hibah KPU, Bawaslu dan TNI Polri, selain itu juga diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.13
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi		Belanja Modal		Jumlah
2023	Rp	23.232.216.566,00	Rp	85,100,991,00	Rp 23.317.317.557,00
2024	Rp	31.689.394.4933,00	Rp	85,023.050,00	Rp 33.806.315.468,00

Dukungan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. Terlihat pada tabel 1.1.12, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2024 terdapat kenaikan anggaran belanja Yang disebabkan adanya penambahan anggaran pada Hibah pilkada 2024 bagi KPU, Bawaslu dan TNI Polri.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tanggapan atas Laporan Hasil Evaluasi dimaksud :

A. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2023 :

1. Hasil Penilaian AKIP per komponen :
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja mendapat nilai 20,98 dari nilai maksimal 30.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja mendapat nilai 18,43 dari nilai maksimal sebesar 30.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja mendapat nilai 10,18 dari nilai maksimal 15.
 - d. Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 17,75 dari nilai maksimal 25.
2. Catatan atas Penilaian AKIP Tahun 2022 :
 - a. Dokumen perencanaan perangkat daerah dan pemutakhirannya agar dapat di publikasikan tepat waktu melalui media resmi dapat secara online maupun offline.
 - b. Melakukan optimalisasi proses pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dari pimpinan
 - c. Meningkatkan dialog kinerja dari penetapan target kinerja hingga pelaksanaan monitoring dari capaian kinerja melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai. Serta mendokumentasikan hasil dari dialog kinerja disertai dengan rekomendasi/simpulan/umpan balik yang diperlukan untuk pencapaian kinerja.
 - d. Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara berkala dan seluruh proses monitoring tersebut agar didokumentasikan secara tertib dengan hasil monitoring yang

menyertakan alternatif perbaikan untuk pelaksanaan rencana aksi periode selanjutnya

- e. Menyusun pedoman pengukuran kinerja untuk memastikan validasi dan kualitas capaian data yang dihasilkan perangkat daerah
- f. Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik untuk tahun ini dan tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti dukung yang cukup dan memadai serta disampaikan secara tertulis kepada inspektorat.
- g. Menyusun laporan kinerja dengan sistematika penyusunan dan penyajian laporan kinerja berdasarkan pedoman peraturan menteri pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi No 53 Tahun 2014 disertai analisis secara memadai untuk setiap untuk setiap pernyataan sasaran strategis.

B. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2022

Pada prinsipnya kami sependapat dengan Catatan Atas Penilaian AKIP Tahun 2023 dan akan ditindaklanjuti :

NO	URAIAN	TINDAKLANJUT			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu baik melalui media online dan offline.	-		√	√
b.	Melakukan proses pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang disertai dengan bukti dokumentasi kinerja dan umpan balik berkelanjutan dari pimpinan	-	√	√	
c.	Melakukan dialog kinerja pada penetapan target kinerja hingga pelaksanaan monitoring dari capaian kinerja melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dan mendokumentasikan hasil dari dialog kinerja disertai dengan rekomendasi/simpulan/umpan balik yang diperlukan untuk pencapaian kinerja.	-	√	√	√
d.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap	-	√	√	√

	rencana aksi secara berkala dan mendokumentasikan secara tertib yang menyertakan alternatif perbaikan untuk pelaksanaan rencana aksi periode selanjutnya.				
e.	Menyusun pedoman pengukuran kinerja setiap Bidang melalui tahap Verifikasi dan Validasi	-	-	√	-
f	Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilengkapi dengan bukti dukung yang cukup dan memadai.	-	-	√	-
g.	Memperbaiki Penyusunan Lakin dan Sub. Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Permenpan RB 53 Tahun 2014.	-	-	√	√-

Perencanaan Kinerja**A. RENCANA STRATEGIS**

Memasuki Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama RPD dan Renstra 2024-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam mendukung Program dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2019- 2023).

RPD Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode tiga tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kinerja OPD

2.1.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

Visi dalam Dokumen rencana strategis didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode perencanaan.

Sedangkan Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan visi.

sedangkan untuk Periode Renstra 2024-2026 dalam acuan penyusunan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol 2024-2026 tidak terdapat Visi dan Misi dikarenakan terjadinya kekosongan Pimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka, Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka 2019-2023 sampai dilaksanakannya Pilkada ulang 2025. Sehingga dalam penyusunan tujuan sasaran Renstra Badan Kesbangpol 2024-2026 mengaju kepada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan RPD Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.*** sedangkan

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran RPD yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat***"

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan RPD Kabupaten Bangka

Tahun 2024-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategi beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Sebagaimana Tujuan RPD yang telah ditetapkan, untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu

"Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum"

b. Sasaran

Sedangkan Rumusan sasaran yang hendak dicapai dalam mencapai tujuan yaitu :

- Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat
- Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hubungan Tujuan dan Sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	80%	75%	70%
			Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya				
			Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial				

2		Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	70%	70%	70%
			Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat				
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	BB (71,00)	72,00 (BB)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

2.2.1 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

- Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Peningkatan Ketahanan sosial dan budaya masyarakat.
- Peningkatan pendidikan politik masyarakat Peningkatan kewaspadaan Penanganan konflik social.
- Peningkatan pembinaan Organisasi kemasyarakatan .
- Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah.

2.2.2 Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

Dalam rangka mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerapkan beberapa kebijakan ;

- Penguatan implementasi wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat
- Peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental.

- c. Penguatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika.
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan beragama
- f. Fasilitasi Forum kemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi deteksi cegah dini.
- g. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- h. Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan
- g. Optimalisasi fungsi FORKOPIMDA
- h. Peningkatan pemantauan dan pendataan WNA/Orang asing di Kabupaten Bangka
- i. Pemetaan wilayah rawan keamanan dan ketertiban.
- j. Penguatan kerjasama dan jejaring dengan instansi terkait dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertian masyarakat.
- k. Penguatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat
- l. Penguatan kualitas SDM Organisasi Politik
- m. Meningkatkan pengawasan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)
- n. Penguatan kualitas Sumber daya manusia Organisasi Masyarakat.
- o. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel.
- p. Penguatan Kompetensi pegawai.
- q. Penyediaan Sarana dan Prasarana kerja.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	1.1	Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.1	Penguatan implementasi wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi
						1.2	Peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental.	
						1.3	Penguatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	

				1.2	Peningkatan Ketahanan sosial dan budaya masyarakat	1.1	Penguatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkotika	
						1.2	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan beragama	
				1.3	Peningkatan kewaspadaan Penanganan konflik sosial	1.1	Fasilitasi Forum kemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi deteksi cegah dini.	
						1.2	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	
						1.3	Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan	
						1.4	Optimalisasi fungsi FORKOPIMDA	
						1.5	Peningkatan pemantauan dan pendataan WNA/Orang asing di Kabupaten Bangka	
						1.6	Pemetaan wilayah rawan keamanan dan ketertiban.	
						1.7	Penguatan kerjasama dan jejaring dengan instansi terkait dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertian masyarakat.	
				1.2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	1.1	Penguatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu kada
						1.2	Penguatan Pemahaman dan Kesadaran Politik Pemilih Pemula bagi Generasi Muda	
						1.3	Peningkatan fungsi parpol dan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	
					Peningkatan pembinaan Organisasi kemasyarakatan	1.1	Meningkatkan pengawasan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)	
						1.2	Penguatan kualitas Sumber daya manusia Organisasi Masyarakat.	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka	1.1	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah	1.1	Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
						1.2	Penguatan Kompetensi pegawai	
						1.3	Penyediaan Sarana dan Prasaran kerja	

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 maupun Program dan Kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Struktur Program dan Kegiatan terkait langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BER KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,030,000,000	1,021,900,000	(8,100,000)
Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,030,000,000	1,021,900,000	(8,100,000)
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	27,144,383,200	29,504,664,386	2,360,281,186
Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	27,144,383,200	29,504,664,386	2,360,281,186
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20,000,000	20,000,000	-
Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20,000,000	20,000,000	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	165,000,000	155,460,420	(9,539,580)

Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	165,000,000	155,460,420	(9,539,580)
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	125,000,000	97,780,501	(27,219,499)
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	125,000,000	97,780,501	(27,219,499)
JUMLAH		28,484,383,200	30,799,805,307	2,315,422,107

Berdasarkan Tabel 2.1 menyatakan bahwa adanya penambahan anggaran yang signifikan pada anggaran perubahan 2024 dikarenakan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 2024 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten wajib menganggarkan dana hibah Pilkada pada APBD Perubahan 2024 sebanyak 40 Persen, dan APBD 2024 sebanyak 60 persen. Terjadi penambahan anggaran sebelum perubahan pada anggaran Hibah TNI sebesar 539.891.600,00 Dan Polri Rp. Sebesar 1.731.207.200,00. Anggaran tersebut sudah di anggarkan pada anggaran perubahan 2023 tetapi tidak dapat dilakukan pencairan pada akhir tahun 2023 dikarenakan belum adanya juknis pencairan Hibah pengamanan pilkada dan belum memasuki tahap pilkada sehingga tidak dilakukan pencairan dan dilakukan pengangagran kembali pada anggaran sebelum perubahan pada tahun 2024. Anggaran pilkada untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 29.372.422.386,00.

Tabel 2.4
Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,720,900,248	2,880,091,563	159,191,315
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,530,800	41,955,800	(4,575,000)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,830,807,540	2,057,530,235	226,722,695
Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29,750,000	10,000,000	(19,750,000)
Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130,693,199	165,093,948	34,400,749
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406,714,853	431,032,322	24,317,469
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163,634,450	85,023,050	(78,611,400)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,769,406	89,456,208	(23,313,198)
JUMLAH		2,720,900,248	2,880,091,563	159,191,315

2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

2.4.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 – 2026 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2024 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Banga. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	3	3	4	5
1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80%
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%
		Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	100%
			Persentase pemilih pemula disatukan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	35%
		Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	Persentase Ormas yang aktif	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	B (69,00)

2.4.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

Tabel. 2.6
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

N O.	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat		Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	Persen	$x = \frac{\text{Jumlah Potensi Konflik yang terjadi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi konflik tahun lalu}} \times 100 \%$
			Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	$x = \frac{\text{Jumlah Unsur masyarakat yang mendapatkan pembinaan}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100 \%$
			Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	$x = \frac{\text{Jumlah Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terealisasi}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100 \%$
			Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Persen	$x = \frac{\text{Jumlah penanganan konflik sosial yang terjadi}}{\text{Seluruh Kejadian Konflik}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan			Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada		$x = \frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada}}{\text{Seluruh jumlah mata pilih}} \times 100 \%$
			Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik		$x = \frac{\text{Jumlah Parpol yang mendapatkan pembinaan politik}}{\text{Jumlah parpol mendapatkan kursi di DPRD}} \times 100 \%$
				Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik		$x = \frac{\text{Jumlah Pemilih Pemula di satuan Pendidikan menengah yang telah mendapatkan pendidikan politik}}{\text{Jumlah seluruh pemilih pemula di satuan pendidikan}} \times 100 \%$
			Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	Persentase Ormas yang aktif		$x = \frac{\text{Jumlah Ormas yang aktif}}{\text{Jumlah Ormas yang terdaftar}} \times 100 \%$

2.4.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Dokumen Renstra badan Kesbangpol 2024-2026, Dokumen Rencana Kerja 2024, IKU, dan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2024.

Pada Tanggal 29 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dan pada tanggal 11 November ditetapkan perjanjian Perubahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu

: **Tabel 2.7**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	%	80	80
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	%	70	70
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	B (67,34)	B (69,00)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET.
		SEBELUM	SESUDAH	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.720.900.248,00	2.880.091.563,00	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.030.000.000,00	1.021.900.000,00	APBD

3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	27.144.383.200,00	29.631.082.984,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	165.000.000,00	155.460.420,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	125.000.000,00	97.780.501,00	APBD
TOTAL		31.205.283.448,00	33.806.315.468,00	

2.4.4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024 sebagai pendukung pencapaian kinerja sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja, yang ditetapkan secara spesifik dengan informasi kinerja. Adapun program, Kegiatan, sub kegiatan dan indikator Kinerja (outcome), indikator Kinerja (output) berdasarkan Perjanjian Kinerja tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Tabel 2.9
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Tabel 2.10

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Tabel 2.11

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Organisasi Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
4	PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Tabel 2.12
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Tabel 2.13
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

			Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	---	--	---

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian Tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut;

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	HijauTua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	HijauMuda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	KuningTua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	KuningMuda
5.	≤ 50	SangatRendah	Merah

❖ Sumber:Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Perbandingan dan analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja terhadap Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangka Tahun 2024**

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			
			TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	8
1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	80%	80%	68,54	88.54
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemiluk ada	70%	70%	68%	97.14
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	B (67,34)	B (69,00)	B (69,00)	

Penjelasan :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 2 sasaran strategis seperti yang terlihat dalam tabel diatas, dari tabel di atas, terdapat dua sasaran dan dua indikator kinerja. Pada tahun 2024 indikator pada sasaran peertama belum memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 68,54% dari target yang ditetapkan 80%. Dengan demikian capaian capaian untuk indikator ini sebsar 88,54%. Capaian ini di hitung dari formulasi Perhitungan berdasarkan tabel di bawah ini :

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran Strategis	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	(Jumlah Potensi Konflik Tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Tahun lalu /Potensi Konflik Tahun lalu X 100%) + (Bidang Kewaspada an Nasional dan Penangan an Konflik

Berdasarkan formulasi sasaran pertama bahwa dilakukan dengan membandingkan Jumlah Potensi Konflik Tahun 2024 dan 2023. Jumlah potensi konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian – kejadian, aksi, unjuk rasa serta kekerasan Perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bangka yang dianalisis bisa menimbulkan potensi konflik di Kabupaten Bangka. Jumlah potensi yang terjadi dan terdata di Kabupaten Bangka dari bulan Januari s.d Desember 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Dimana berjumlah 89 potensi konflik. Sedangkan jumlah potensi konflik 2023 sebanyak 150 potensi konflik. Sehingga didapat perhitungan $(150-89)/89 \times 100\% = 68,54\%$ sehingga Capaian Kinerja 88,54%, tetapi potensi konflik seluruhnya sudah dilakukan penanganan dan penyelesaian sehingga tidak sampai terjadinya konflik. Meskipun secara keseluruhan total jumlah potensi konflik mengalami penurunan seiring dengan telah berlalunya Tahap pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Secara keseluruhan Penyebab terjadinya potensi konflik pada tahun 2024 disebabkan :

1. Telah berlalunya tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menyebabkan aktivitas politik masyarakat seperti aksi relawan cabup/cawabup dan kampanye melibatkan masa, pengawasan netralitas ASN.
2. Bangka Belitung secara nasional masuk peringkat 8 daerah rawan konflik.
3. Keterbatasan Anggaran Badan Kesbangpol dalam deteksi dini, cegah dini serta Penanganan Potensi Konflik serta Tidak tersedianya anggaran pada Tim Terpadu Pengawasan dini masyarakat
4. Anggaran Badan Kesbangpol yang sangat memprihatinkan dalam pencegahan terjadinya potensi konflik di Kabupaten Bangka.
5. Keterbatasan Intelijen Badan Kesbangpol dalam mengatasi deteksi dini, cegah dini potensi konflik

6. Kurangnya sarana dan prasarana Badan kesbangpol dalam mendukung pencegahan potensi konflik di Kabupaten Bangka.
7. Kurangnya kerjasama dengan pihak terkait dalam mengurangi potensi konflik

Sedangkan pada Sasaran Strategis ke 2 dengan indikator hasil **Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada**

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	(Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam pemilukada dibagi seluruh jumlah mata pilih di kali seratus persen	Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas

Bahwa pelaksanaan Sasaran Stretgis ke 2 untuk indikator PersentaseTingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada belum memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 68% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 97.14%. capaian inidkator ini dihitung dari formula perhitungan berdasarkan tabel diatas yaitu dilakukan perhitungan berdasarkan hasil partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024. Pemilu 2024 pada pemilihan Presiden dan anggota legislatif jumlah Partispasi pemilih berjumlah 193.065 dengan daftar Pemilih tetap (DPT) berjumlah 234.537 sehingga partisipasi pemilih pada pemilu 82,32 % sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Bupati pada Pilkada 2024 partisipasi pemilih berjumlah 127.720 pemilih dan Daftar Pemilih tetap (DPT) berjumlah 237.930 sehingga partisipasi pemiih pada pilkada 2024 sebesar 53,68%. Sehingga Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pilkada yaitu 82,32% ditambah 53,68% dibagi 2 yaitu 68%. Sedangkan target partisipasi pemilih 2024 70% dengan realisasi 68% sehingga pencapaian 97,14%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada masih rendah disebabkan :

- a) Faktor cuaca yang tidak mendukung pada waktu pelaksanaan pilkada

- b) Tidak adanya calon kepala daerah yang sesuai aspirasi masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih
- c) Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap calon kepala Daerah
- d) Kurangnya Sosialisasi terhadap partisipasi pemilih
- e) Adanya Rasionalisasi dan efisiensi anggaran serta tingkat kesadaran masyarakat dalam politik masih rendah

Sedangkan pada Sasaran Strategis ke 3 dengan indikator hasil **Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah**. Tahun 2024 ini Badan Kesbangpol menargetkan nilai B(69,00).

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi yaitu 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) indikator, 6 Program, 12 (Dua belas) kegiatan, 17 (Tujuh belas) Sub Kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan penetapan indikator kinerja outcome.

2. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah Ini :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			
			TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	8
1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	80%	80%	68,54	88.54

2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemiluk ada	70%	70%	68%	97.14
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	B (67,34)	B (69,00)	B (69,00)	

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		2023	
			TARGET	% CAPAIAN	TARGET	% CAPAIAN
1	2	3	4		5	
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	85	78,43	90	80,36
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	65	65	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	BB (71,51)	B (67,34)	BB (67,34)	B (67,34)

Berdasarkan analisis Capaian Kinerja terhadap realisasi Tahun 2024 dengan target tahun lalu dan tahun sebelumnya bahwa capaian Kinerja Badan keatuan bangsa dan Politik Tahun 2024 ini dinyatakan sedang pada sasaran pertama. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 68.54% dari target tahun ini sebesar 80% tetapi untuk sasaran pertama belum bisa dilakukan analisis capaian dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya

dikarenakana adanya perbedaan sasaran strategis dan Indikator Kinerja pada 2024 dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Perubahan ini menyesuaikan dengan perubahan sasaran strategis Renstra 2024-2026 dibandingkan dengan sasaran renstra 2019-2023. Sedangkan tahun 2024 merupakan tahun pertama awal pelaksanaan tujuan Renstra 2024-2026. Sedangkan untuk **sasaran meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat** ini dinyatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan realisasi 68% dari target yang ditetapkan tahun ini 70% yang berarti capaian kinerja untuk indikator ini tercapai 97.14%. untuk sasaran kedua juga tidak bisa dilakukan analisis dikarenakan perbedaan indikator perhitungan. Tahun 2024 pelaksanan pemilu dan Pilkada sehingga indikator yang dihitung jumlah partisipasi pada pemilu dan pilkada sedangkan sasaran 2022 dan 2023 indikator yang dihitung pembinaan politik dan ormas. Untuk realisasi mengalami kenaikan dari tahun lalu yaitu tahun 2022 65% sedangkan 2023 100%. Sedangkan analisis program, Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dengan 2022 dan 2023 berdasarkan tabel berikut.

Tabel 3.4
CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024				KETERAN GAN
			TARGET	TARGET PERUBAHA N	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	4	6	7	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100%	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	100%	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	42 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	100%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%	18,75	100%	
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	100	100%	
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	43.48%	43.48%	100	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	27.08%	27.08%	27.08%	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	1 Unit	1 Paket	100%	

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit di Racionalisasi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	58.33%	58.33%	58.33%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	2 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
		Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80 %	80 %	80 %	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang (30 orang Laki-laki dan 30 orang Perempuan)	60 Orang (30 orang Laki-laki dan 30 orang Perempuan)	60 Orang (30 orang Laki-laki dan 30 orang Perempuan)	100%	
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
		Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	100%	100%	100%	100%	

		Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	35.00%	35.00%	0.00%	0%	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase satuan Pendidikan menengah yang siswanya mendapatkan pendidikan Politik	36%	36%	0%	0%	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	207.440 Orang Pemilih pada PEMILU/PILK ADA	206.805 Orang Pemilih pada PEMILU/PILK ADA	100%	100%	
			12 Parpol	12 Parpol	12 Parpol	100%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	100%	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
		Persentase Ormas yang aktif	65 %	65 %	65 %	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	33.33 %	33.33 %	60%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
		Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1334 Orang	1 Orang (1 Forum)	1 Orang (1 Forum)	100%	Rasionalisasi Anggaran dan Sisa Anggaran Hibah FKUB
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
		Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	80%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan Desa/Keluurahan yang dilakukan pembinaan	12.35%	12.35%	12.35%	100%	
		Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>3 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	<i>1 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	<i>1 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	100%	<i>Efisiensi Anggaran dan Rasionalisasi Anggaran</i>
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Tabel 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022 DAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR 2023	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2022	2022			2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	6	7	4	6	7
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	26.5	20.98	77.70%	27,00	27,00	100%

			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11	10.18	85%	12,00	12,00	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	6 Dokumen	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			19 Dokumen	100%	5 Dokumen	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	19 Dokumen	100%		3 Laporan	100%	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8 Laporan	100%	100%
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	100%	23 Orang/bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	18 Orang/bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	2 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	52 Laporan	52 Laporan	100%
			Indeks Profesionalisme Aparatur	64.66	64.66	64.66	64,76	64,76	100
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0.00%	0.00%	0.00%	18,75	18,75	100%
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	100%	100%	100	100	100%
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100	100	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel	16 Stel	100%	1 Paket	100%	100%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	4 orang	100%	100%
			Indeks Sarana dan Prasarana	65	65	65	70	70	100%

			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	30%	30%	30%	40	40%	100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	100%	11 Unit	11 Unit	100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Jumlah Layanan Penyediaan Internet yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Persentase BMD dalam kondisi baik	65%	65%	65%	70%	70%	100%

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	100%	2 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	100%	100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	100%	12 Unit	100%	100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit
II.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
			Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	0	0%	100%	50%	50%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	0	0%	100%	50%	50%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					30 Orang (Peserta Paskibraka Kabupaten)	30 Orang (Peserta Paskibraka Kabupaten)	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	0	0%	Defisit Anggaran	0%	-

III.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
			Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	90%	90%	90%	100%	100	90%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, erwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan	0	0	0%	40 orang (Sosialisasi Pemilih Pemula)	40 orang (Sosialisas i Pemilih Pemula)	100%
			Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	12 Parpol	12 Parpol	100%	12 Parpol	12 Parpol	100%
							206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempua n)	206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempu an)	100%

	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>					<i>1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)</i>	<i>1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)</i>	<i>100%</i>
IV.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
			Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya</i>	<i>Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi</i>	<i>5 LNL</i>	<i>5 LNL</i>	<i>100%</i>	<i>5 LNL</i>	<i>5 LNL</i>	<i>100%</i>
V.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
			Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	90%	90%	90%	100%	100%	100%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat	90%	90%	90%	100%	100%	100%

		Ekonomi, Sosial dan Budaya	Beragama dan Penghayat Kepercayaan						
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama</i>	<i>40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)</i>	<i>40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)</i>	<i>100%</i>			
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		<i>1 Forum</i>	<i>100%</i>		<i>1 Forum</i>	<i>1 Forum</i>	<i>100%</i>
VI.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
			Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	90%	90%	80%	100%	100%	80%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	80%	100%	100%	80%
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>40 orang peserta Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>40 orang peserta Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>100%</i>

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan (Pemantauan Orang Asing)	2 Laporan (Pemantauan Orang Asing)	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%	Defisit Anggaran	Defisit Anggaran	0%

Berdasarkan tabel 2.4 perbandingan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan 2024, 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan capaiannya dikarenakan perbedaan indikator Program dan Kegiatan sedangkan untuk indikator sub kegiatan ada yang sama tahun 2024 dengan 2023 berdasarkan penjelasan tabel diatas. Perbedaan Indikator disebabkan untuk capaian 2024 mengacu dengan Renstra 2024-2026 sedangkan capaian 2022 dan 2023 mengacu pada Renstra 2019-2023.

3. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Lakin 2024 merupakan tahun pertama Renstra 2024-2026. Untuk perbandingan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah berdasarkan Renstra 2024-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	
			2024	2025	2026
1	3	5	6	7	8
1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	68,54%	75%	70%

2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	97,14%	70%	70%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	BB (71,00)	72,00 (BB)

Tabel 3.5

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan Renstra 2019-2023

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	SATUAN	REALISASI		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	Persen	62.5	78,43	80,36
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Persen	BB 71,51	B 67,34	B 67,34

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat dilihat realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja utama Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi dengan capaian 68.54% dan Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada 97,14 % tetapi tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis. sedangkan pada tabel 3.10 Sasaran strategis pada Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dengan indikator Kinerja Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat dengan capaian 100%.

4. Analisis Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Menengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat oleh karena itu tidak terdapat identifikasi (nihil).

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja berdasarkan 3 sasaran strategis terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dibawah target. Capaian kinerja menurunnya persentase Konflik sosial di masyarakat belum tercapai Hal ini dikarenakan adanya :

1. Adanya Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di Kabupaten Bangka
2. Dukungan anggaran yang sangat minim pada Badan Kesbangpol sehingga seluruh kegiatan yang mendukung pencegahan terjadinya potensi konflik di Kabupaten Bangka tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
3. Sumber daya Manusia yang berkualitas di bidang teknis sangat minim dalam cegah dini potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Bangka dan
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam bekerjasama dengan seluruh instansi terkait dalam pencegahan potensi Konflik di Kabupaten Bangka.
5. Badan Kesbangpol telah membentuk tim dan forum-forum strategis yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat tetapi permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol untuk menjalankan Forum - forum yang telah di bentuk tidak bisa dijalankan dengan sempurna karena keterbatasan ketersediaan anggaran Badan Kesbangpol dalam operasional pelaksanaan kegiatan.

sedangkan keseluruhan ditahun 2024 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka terhadap sasaran strategis dapat

dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan beberapa SKPD dan instansi terkait
- b. Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Bangka seperti FKUB, FPK, dan Forkopimda.
- c. Terjalinnya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Bangka dan instansi lainnya dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
- d. Dukungan Masyarakat dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Bangka.
- e. Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan kesbangpol sendiri.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Masih terbatasnya jumlah Inteligen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi.
- b. Permasalahan masih adanya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bangka yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
- c. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan khususnya anggaran untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk.
- d. Belum optimalnya peran kecamatan dalam deteksi dini terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban di daerahnya.
- e. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dan Berkualitas di Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

- f. Terbatasnya jumlah Pelaksana ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol
- g. Adanya rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang menyebabkan adanya kegiatan yang ditunda pelaksanaannya.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka diantaranya :

1. Membuat Rencana Prioritas terhadap program dan kegiatan yang dianggap sebagai pendukung utama capaian target kinerja
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan anggaran disesuaikan dengan kegiatan prioritas perangkat daerah.
3. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi
4. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat
5. Memaksimalkan fungsi Intelijen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di daerah.
6. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah dan;
7. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.
8. Melakukan penganggaran kembali di tahun berikutnya terhadap kegiatan atau sub kegiatan yang mengalami rasionalisasi di tahun 2024.

9. Meningkatkan jumlah Sumber daya manusia dan kualitas pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan efisien.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka selama Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut :

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

- Realisasi secara fisik telah mencapai target, untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan perencanaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan;
- Terjadinya Defisit Anggaran sehingga diwajibkan melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang belum di prioritaskan untuk dilaksanakan.

Dari 3 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, terdapat 1 (satu) sasaran yang capaiannya tidak memenuhi target yaitu :

1. Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat

a) Tingkat Efektifitas mencapai 89,55% seperti tertuang dalam tabel berikut :

NO	TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN	REALISASI	% KINERJA	% KEUANGAN	TINGKAT EFEKTIFITAS
1	80%	68,54	88.54	94.34	93.85%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran mencapai 68,54% dengan tingkat efektifitas 94.34% dengan kriteria keberhasilan sedang dengan kata lain kurang efektif. Program Penunjang sasaran ini ada 3 yaitu :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Tingkat Efektifitas diperoleh dari :

$$x = \frac{\% \text{ Kinerja}}{\% \text{ Keuangan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{88.54}{94.36} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{93.85}$$

b) Efisiensi penggunaan Sumber Daya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk menunjang pencapaian Sasaran dengan efisiensi dihitung berdasarkan realisasi keuangan 3 Program yang menunjang sasaran Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat. Tingkat efisiensi mencapai - 5,8% seperti tertuang dalam tabel berikut :

NO	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% KINERJA	% KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	1,275,140,921.00	1,203,016,488.00	88.54	94.34	-5.8%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pagu anggaran yang mendukung pencapaian sasaran mencakup 3 (tiga) program pada tahun 2024 sebesar Rp 1.275.140.921,00 dan Realisasi mencapai Rp, 1.203.016.488,00 dengan persentase keuangan 94,34%. Dengan demikian tingkat efisiensi -5,8%.

Tingkat Efisiensi diperoleh dari :

$$x = \% \text{ Kinerja} - \% \text{ Keuangan}$$

$$= \mathbf{88.54\% - 94.34\%}$$

$$= \mathbf{-5,8\%}$$

2. Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat

a) Tingkat Efektifitas mencapai 97,14% seperti tertuang dalam tabel berikut :

NO	TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN	REALISASI	% KINERJA	% KEUANGAN	TINGKAT EFEKTIFITAS
1	70%	68%	97.14	99.99	97.14%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran mencapai 68% dengan tingkat efektifitas 97.14% dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi..

Program Penunjang sasaran ini ada 2 yaitu :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat Efektifitas diperoleh dari :

$$x = \frac{\% \text{ Kinerja}}{\% \text{ Keuangan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{97.14}{99.99} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{97.14\%}$$

- b) Efisiensi penggunaan Sumber Daya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk menunjang pencapaian Sasaran dengan efisiensi dihitung berdasarkan realisasi keuangan 2 Program yang menunjang sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Tingkat efisiensi mencapai -5,8% seperti tertuang dalam tabel berikut :

NO	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% KINERJA	% KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	29,474,180,996.00	29,471,765,890.00	97.14%	99.99%	-2.85%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pagu anggaran yang mendukung pencapaian sasaran mencakup 2 (dua) program pada tahun 2024 sebesar Rp 29.474.180.996,- dan Realisasi mencapai Rp, 29.471.765.890,- dengan persentase keuangan 99.99%. Dengan demikian tingkat efisiensi -2.85%.

Tingkat Efisiensi diperoleh dari :

$$x = \% \text{ Kinerja} - \% \text{ Keuangan}$$

$$= 97.14\% - 99.99\%$$

$$= \mathbf{-2,85\%}$$

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Penyerapan Anggaran	Efisiensi (pagu-serapan)
1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	88.54%	94.34	-5,8
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	97.14%	99.99	-.2.85
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	95.52	-26.52

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian kinerja

Analisis Program yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024, secara umum semua program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Adapun program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan realisasi capaian 100%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Indikator keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 8 (Delapan) Dokumen yakni 1 Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, 1 Dokumen Renja Perubahan 2024, 1 Dokumen RKA 2024, 1 Dokumen RKA Perubahan 2024 dan 1 (satu) Dokumen Perubahan

Renstra 2024-2026, 1 Dokumen DPA 2024, 1 Dokumen DPA Perubahan 2024.

- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 12 (dua belas) laporan yaitu 1 Laporan Rencana Aksi, 4 Laporan Evaluasi Rencana Aksi, 4 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Kinerja, 1 Laporan LKPJ dan 1 laporan Tahunan
- c) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan** sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Indikator keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 16 (enam belas) orang
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan inikator keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 Dokumen yaitu Dokumen Verifikasi Januari sampai Desember sebanyak 12 Dokumen
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan Inikator Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target 42 Laporan yaitu 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Semester awal dan Akhir, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Aset, 2 Dokumen Prognosis Semester awal dan semester akhir dan 1 Dokumen Laporan Penggunaan Anggaran Hibah.
- d) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan tarhet 16 Orang tetapi dilakukan Rasionalisasi anggaran sehingga target menjadi 0%.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan

indikator Keluaran yaitu Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 2 Orang dengan capaian 100%.

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan, dengan capaian kinerja 100%.
- b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan indikator keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 12 Dokumen dengan capaian 100%.
- c. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator keluaran yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD target 12 Dokumen dengan capaian 100%.

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel dengan indikator keluaran yaitu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan target 1 unit dengan capaian kinerja 100%.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 4 unit yaitu 2 unit sudah terealisasi dan 2 unit mengalami Rasionalisasi Anggaran sehingga capaian kinerja 100%.

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator keluaran yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 laporan dan pencapaian kinerja 100%.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 laporan dan pencapaian realisasi kinerja 100%.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 laporan dan realisasi 100%.

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan inikator keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 7 unit yaitu 2unit Kendaraan roda 2 dan 5 unit kendaraan roda empat dan capaian kinerja 100%.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan inikator kinerja umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 10 unit dan capaian realisasi kinerja 100%.

2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, dengan realisasi capaian sebesar 100%.

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Unsur Masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan dibagi target yang direncanakan di kali sertus persen	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan

Penjelasan : Jumlah unsur masyarakat yang mendapatkan pembinaan sebanyak 60 pelajar dibagi Target Siswa sebanyak 60 pelajar di kali 100% sehingga pencapaian 100%. Hal ini dapat tercapai karena adanya sinergi dengan

stakeholder yang baik, antusiasisme seluruh pelajar dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan paskibraka serta kinerja seluruh pegawai Badan kesbangpol dalam menyelenggarakan kegiatan paskibraka dan Hari lahir Pancasila . Adapun kegiatannya sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan Inikator keluaran yaitu:

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dibagi target yang direncanakan di kali seratus persen target kinerja 60 Orang siswa yang terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan seleksi dan Diklat Pskibraka di Kabupaten Bangka yang bertugas sebagai pengibar Bendera 17 Agustus 2024 dengan target 30 orang yang terdiri dari 15 Putra dan 15 Putri.
- 2) Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2024 yang terdiri dari 15 Putra dan 15 Putri yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Bangka dengan target 30 orang dengan capaian realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

N O	SASARAN PROGRAM	Indikator	Formula Indikator	Sumb er Data
1	3	3	4	5
1	Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	Jumlah Parpol yang mendapatkan pembinaan politik/jumlah parpol mendapatkan Kursi di DPRD x 100 %	Bidang Politik dan Ormas
2	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula	Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah pemilih pemula di satuan pendidikan menengah yang telah mendapatkan pendidikan politik dibagi jumlah seluruh pemilih pemula di satuan pendidikan dikali 100 persen	

Penjelasan :

Pencapaian pada program Peningkatan Peran Partai Politik dengan Indikator Persentase Parpol yang diberikan pembinaan Politik yaitu untuk Pemilu tahun 2019-2023 parpol memenangkan Pemilu yaitu 12 Parpol sedangkan jumlah parpol yang mendapatkan kursi DPRD 2019-2024 sebanyak 12 parpol sehingga pencapaian 100%. Sedangkan untuk DPRD pemilihan 2024-2029 parpol yang memenangkan pemilu sebanyak 9 parpol sedangkan parpol yang mendapatkan suara pemilu 2024 sebanyak 9 parpol sehingga pencapaian 100%.

Sedangkan untuk Indikator Persentase pemilih pemula di satuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Untuk tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka telah melontarkan anggaran Hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 kepada KPU yang salah satunya berisi pendidikan politik kepada pemilih pemula dan masyarakat. Oleh karena itu Badan Kesbangpol melakukan rasionalisasi dan efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun dalam pencapaian kinerja tersebut di dukung dengan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan target kinerja sebagai berikut :

1. 206.733 target Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangka tahun 2019 Sedangkan untuk Daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Bangka tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding Pemilu tahun 2019 yaitu 237.930 orang pemilih sehingga realisasi pencapaian 115,09%. Sedangkan untuk Partisipasi Pemilih untuk Pemilu mencapai 82,31% sedangkan Partisipasi Pemilih untuk Pilkada 53,68%. Sehingga Partisipasi Pemilih yang ditargetkan 70 % tercapai 68% pencapaian realisasi 97,14%
 2. 72 orang pembinaan verifikasi Keuangan Partai Politik yag terdiri dari anggota setiap partai politik yang mendapatkan pembinaan. Dengan 12 parpol pencairan Verifikasi Keuangan Partai Politik peride 2019-2023 sedangkan untuk pemilihan legislatif 2024 partai politik yang mendapatkan suara 9 partai sehingga pencapaian kinerja verifikasi keuangan partai politik 100%.
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan inikator keluaran yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dengan target 1 laporan dengan capaian 100 % yaitu
- a. Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Pemilu yang dilaksanakan dari bulan Januari s.d pelaksanaan pemantauan pemilu tanggal 14 Februari 2024.
 - b. Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Pilkada dari persiapan pilkada, pembersihan alat kampanye sampai pemnataan Pilkada pada taggal 27 November 2024.
 - c. Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dengan target 8 Sekolah di Kabupaten Bangka tidak dapat dilaksanakan di karenakan Rasionalisasi anggaran dan efisiensi anggaran. Untuk kegiatan Pendidikan Politik baik masyarakat maupun pemilih pemula Kabupaten Bangka telah memberikan anggaran Hibah

untuk KPU sebanyak 28 M yang salah satunya diperuntukkan untuk sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga untuk mengurangi defisit anggaran yang di alami Kabupaten Bangka maka dilakukan efisensi dengan mengurangi pelaksanaan kegiatan.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Realisasi Capaian 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	Persentase Ormas yang aktif	Jumlah ormas yang aktif dibagi jumlah ormas yang terdaftar di kali 100 persen	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Penjelasan :

Pencapaian pada Program pemberdayaan dan Pengawasan Ormas di dapatkan dari perhitungan jumlah ormas yang aktif di Kabupaten Bangka sebanyak 75 ormas sedangkan ormas yang terdaftar sebanyak 79 ormas sehingga dengan target 100% dihasilkan 75 ormas dibagi 79 ormas dikali 100% dengan capaian kinerja 94,93 % ormas yang aktif. Pencapaian kinerja dengan dukungan kegiatan yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan target kinerja 100% dengan capaian kinerja 100% dengan penjelasan pada sub kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan inikator keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan target 40 orang Yang terdiri dari : Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan dengan tema "Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas" yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2024 di Gedung OR Parai Tinggi Kabupaten Bangka dengan peserta sebanyak 40 orang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bangka dan tersusunnya 1 (satu) laporan.

5. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya** dengan realisasi capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(Jumlah kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terealisasi dibagi target yang direncanakan di kali 100 persen	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi

Penjelasan :

Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan Target Kinerja 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan perhitungan jumlah kebijakan sebanyak 1 kebijakan dibagi dengan target 1 kebijakan dikali 100% sehingga pencapaian 100%. Pencapaian kinerja dengan dukungan kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan penjelasan pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan keluaran antara lain:
- 2) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah dengan target kinerja 1 Orang yaitu merupakan anggaran Hibah FKUB dengan target 1 orang (1 Forum).

6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** dengan realisasi capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

N O	Sasaran Program	Indikator	Formulasi Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang terjadi dibagi seluruh kejadian konflik yang terjadi dikali 100 persen	Bidang Wawasan Nasional

Pada sasaran meningkatnya kewaspadaan dini konflik sosial dengan target 100% dapat direalisasikan dengan capaian 100% hal ini dilakukan dengan melakukan pembinaan, pencegahan dan penanganan terhadap potensi konflik yang terjadi sehingga tidak sampai terjadinya konflik. Jumlah Potensi Konflik di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebanyak 150 kasus sedangkan konflik yang terjadi di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 berjumlah 0 Kasus. hal ini dilakukan dengan perhitungan yaitu 150 kasus yang telah dilakukan Penanganan 2024 dibagi 0 kasus dikali 100% dihasilkan 100% Sehingga persentase cakupan penanganan konflik sosial dengan realisasi kinerja 100%. Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program yaitu :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator keluaran antara lain:

Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rapat dan Pemantauan dan Pengawasan keberadaan orang asing yang ada di Kabupaten Bangka bekerjasama dengan Tim Penanganan Orang asing yang terdiri dari beberapa instansi yaitu : Disperindag, Imigrasi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim, Polres, Lanal, BAIS, dan BIN yang dilaksanakan dari tanggal 08 Mei s.d 04 Juli 2024 di 6

Lokasi di Kabupaten Bangka dan tersusunnya Laporan sebanyak 1 Laporan.

2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator keluaran yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 3 kali rapat dalam setahun dan tersusunnya laporan sebanyak 1 (satu) Dokumen.

Secara langsung jika dilihat dari program , kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen anggaran yang telah ditetapkan dapat dinyatakan bahwa program , kegiatan dan sub kegiatan sangat menunjang pencapaian pernyataan kinerja namun dengan adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sehingga Pencapaian pernyataan kinerja tidak sepenuhnya didukung oleh program, kegiatan dan Sub kegiatan.

Permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang antara lain adalah:

a. Faktor internal

1. Sarana dan prasara yang masih kurang dan belum memenuhi standar kerja.
2. Jumlah SDM yang masih terbatas.
3. Jumlah anggaran yang tersedia belum sesuai dengan perencanaan.
4. Profesional dan integritas aparatur yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan.
5. Sistem dan proses kerja yang belum optimal dan sistematis.
6. Proses administrasi yang belum berjalan dengan baik.
7. Pemahaman terhadap tupoksi dan aspek kerja yang masih kurang.

b. Faktor eksternal

1. Jumlah organisasi sosial yang fokus pada bidang kesatuan bangsa.
2. Jumlah forum lintas agama yang fokus pada penguatan kesatuan bangsa.
3. Jumlah lembaga masyarakat yang fokus pada bidang kesatuan bangsa.
4. Jumlah forum lintas agama, organisasi masyarakat dan lembaga peneltian yang aktif dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenBangka.
5. Jaringan kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dengan

organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan forum keagamaan yang fokus pada bidang kesatuan bangsa dan Politik.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, maka strategi pemecahan masalah yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mengarah pada :

- 1) Peningkatan koordinasi dan integrasi yang didukung oleh system kerja dan manajerial yang optimal.
- 2) Optimalisasi penggunaan sarpras dan anggaran.
- 3) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran secara offline maupun online.
- 4) Peningkatan kerjasama dan komunikasi antara lembaga daerah, ormas, serta lembaga vertikal lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Belanja

Pada tahun Anggaran 2024, Anggaran Belanja Daerah untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebesar Rp. 33.806.315.468,-, alokasi anggaran ini dipergunakan untuk keperluan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.038.807.485,-, Hibah 29.372.422386,-, Belanja Modal Rp. 84.673.050,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.310.412.547,-

Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi Belanja pada tahun 2024 mencapai Rp. 33.425.946.264,- atau 98,87. Dimana Belanja Tidak Langsung menyerap anggaran sebesar Rp. 1.943.444.350,- atau (95,32%) dengan sisa dana sebesar Rp .380.369.204,- atau 0.011%. untuk rincian penggunaan Belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.943.444.350,-, Belanja tidak langsung terdiri dari :

Tabel 3.7
Belanja Tidak Langsung Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	2024%	SISA ANGGARAN 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	$6 = (3 - 4)$	7
5.1.01	Belanja Pegawai	2,038,807,485.00	1,943,444,350.00	95.32	95,363,135.00	1,829,718,353.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,404,744,192.00	1,352,212,407.00	96.26	52,531,785.00	1,273,363,353.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	952,686,902.00	931,329,905.00	97.76	21,356,997.00	946,184,361.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	952,686,902.00	931,329,905.00	97.76	21,356,997.00	946,184,361.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	62,300,334.00	59,794,314.00	95.98	2,506,020.00	76,990,668.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	62,300,334.00	59,794,314.00	95.98	2,506,020.00	76,990,668.00

5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	111,110,000.00	109,150,000.00	98.24	1,960,000.00	117,490,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	111,110,000.00	109,150,000.00	98.24	1,960,000.00	117,490,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	121,480,000.00	119,280,000.00	98.19	2,200,000.00	0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	121,480,000.00	119,280,000.00	98.19	2,200,000.00	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13,260,000.00	12,880,000.00	97.13	380,000.00	16,360,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13,260,000.00	12,880,000.00	97.13	380,000.00	16,360,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36,065,160.00	35,485,800.00	98.39	579,360.00	45,552,180.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	36,065,160.00	35,485,800.00	98.39	579,360.00	45,552,180.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18,680,424.00	17,884,090.00	95.74	796,334.00	7,242,498.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18,680,424.00	17,884,090.00	95.74	796,334.00	7,242,498.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	92,898.00	13,568.00	14.61	79,330.00	13,638.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	92,898.00	13,568.00	14.61	79,330.00	13,638.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	80,698,000.00	58,723,468.00	72.77	21,974,532.00	55,885,698.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	80,698,000.00	58,723,468.00	72.77	21,974,532.00	55,885,698.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,114,100.00	1,917,788.00	90.71	196,312.00	1,911,066.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,114,100.00	1,917,788.00	90.71	196,312.00	1,911,066.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6,170,274.00	5,753,474.00	93.25	416,800.00	5,733,244.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6,170,274.00	5,753,474.00	93.25	416,800.00	5,733,244.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	86,100.00	0	0	86,100.00	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	86,100.00	0	0	86,100.00	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	627,153,293.00	584,321,943.00	93.17	42,831,350.00	548,845,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	627,153,293.00	584,321,943.00	93.17	42,831,350.00	0

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	627,153,293.00	584,321,943.00	93.17	42,831,350.00	0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0	0	0	0.00	548,845,000.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0	0	0	0.00	548,845,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6,910,000.00	6,910,000.00	100	0.00	7,510,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6,910,000.00	6,910,000.00	100	0.00	7,510,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,910,000.00	6,910,000.00	100	0.00	7,510,000.00
JUMLAH					381,452,540.00	1,829,718,353.00

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp2.038.807.485,00 dengan realisasi Rp.1.943.444.350,00 atau 95,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp.1.829.718.353,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.113.725.997,00. Persentase Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung diperoleh perhitungan dari Jumlah Realisasi Anggaran dibagi anggaran yang tersedia dikali 100%. Untuk realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung menyesuaikan dengan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

Tabel 3.8
Belanja Langsung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA	PENYEBAB
		(Rp.)	(Rp.)			
1	2	3	4	7		8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	848,194,078	814,629,536	96.04%	33,564,542	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,955,800	41,690,000	99.37%	265,800	Efisiensi Anggaran

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,425,000	30,420,000	99.98%	5,000	Efisiensi Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,530,800	11,270,000	97.74%	260,800	Efisiensi Anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,632,750	25,577,500	99.78%	55,250	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13,600,500	13,595,000	99.96%	5,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12,032,250	11,982,500	99.59%	49,750	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	8,805,784	88.06%	1,194,216	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0.00%	-	Rasionalisasi Anggaran
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	8,805,784	88.06%	1,194,216	Efisiensi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165,093,948	162,433,835	98.39%	2,660,113	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,949,532	115,562,235	97.98%	2,387,297	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23,572,208	23,435,800	99.42%	136,408	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23,572,208	23,435,800	99.42%	136,408	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,023,050	76,966,000	90.52%	8,057,050	
	Pengadaan Mebel	49,488,660	48,566,000	98.14%	922,660	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,534,390	28,400,000	79.92%	7,134,390	2 Unit Komputer Rasionalisasi Anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431,032,322	416,190,117	96.56%	14,842,205	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	328,677,614	318,480,680	96.90%	10,196,934	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,014,853	45,908,587	91.79%	4,106,266	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,339,855	51,800,850	98.97%	539,005	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,456,208	82,966,300	92.75%	6,489,908	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82,086,208	77,270,300	94.13%	4,815,908	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,370,000	5,696,000	77.29%	1,674,000	Efisiensi Anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0.00%	-	Rasionalisasi Anggaran

Pada Tabel diatas dilihat bahwa persentase realisasi anggaran belanja langsung diperoleh perhitungan dari Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah anggran yang tersedia dikali 100%. Untuk realisasi anggaran belanja mencapai 96.04%.

Belanja Langsung
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEUANGAN (%)	SISA	PENYEBA B
1	2	3	4	5	6	7
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,021,900,000	975,061,329	95.42%	46,838,671	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,021,900,000	975,061,329	95.42%	46,838,671	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,021,900,000	975,061,329	95.42%	46,838,671	

Pada tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran Belanja Langsung diperoleh perhitungan dari jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah anggaran yang tersedia dikali 100%. Untuk realisasi anggaran Belanja tidak mencapai 100% tetapi Realisasi Fisik mencapai 100%.

Belanja Langsung
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEUANGAN (%)	SISA	PENYEBA B
1	2	3	4	5	6	7

3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	29,631,082,984	29,454,180,996	99.40%	176,901,988	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	29,631,082,984	29,454,180,996	99.40%	176,901,988	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29,504,664,386	29,377,246,756	99.57%	127,417,630	Anggaran Hibah Pilkada
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	126,418,598	76,934,240	60.86%	49,484,358	Tidak dilakukan pencairan bpjs karena tidak adanya juknis pencairan tersebut

Belanja Langsung

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEUANGAN (%)	SISA	PENYEBA B
1	2	3	4	5	6	7
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20,000,000	17,584,894	87.92%	2,415,106	Efisiensi Anggaran
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20,000,000	17,584,894	87.92%	2,415,106	
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20,000,000	17,584,894	87.92%	2,415,106	silva pada belanja Pengadaan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran Belanja Langsung diperoleh perhitungan dari jumlah realisasi anggran dibagi jumlah anggaran yang tersedia dikali 100%. Untuk realisasi anggaran Belanja tidak mencapai 100% tetapi realisasi fisik mencapai 100%.

Belanja Langsung

Program PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEUANGAN (%)	SISA	PENYEBA B
1	2	3	4	5	6	7
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	155,460,420	153,740,000	98.89%	1,720,420	97.78%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	155,460,420	153,740,000	98.89%	1,720,420	97.78%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	155,460,420	153,740,000	98.89%	1,720,420	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran Belanja Langsung diperoleh perhitungan dari jumlah realisasi angagran dibagi jumlah anggaran yang tersedia dikali 100%. Untuk realisasi anggaran Belanja tidak mencapai 100% tetapi realisasi fisik mencapai 100%.

Belanja Langsung
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas
Penanganan Konflik Sosial

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEUANGAN (%)	SISA	PENYEBA B
1	2	3	4	5	6	7
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	97,780,501	74,215,159	75.90%	23,565,342	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	97,780,501	74,215,159	75.90%	23,565,342	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33,040,000	27,547,500	83.38%	5,492,500	Efisiensi Anggaran
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	64,740,501	46,667,659	72.08%	18,072,842	Efisiensi Anggaran

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran Belanja Langsung diperoleh perhitungan dari jumlah realisasi angagran dibagi jumlah anggaran yang tersedia dikali 100%. Untuk realisasi anggaran Belanja tidak mencapai 100% tetapi realisasi fisik mencapai 100%.

B. Gambaran Kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis

Gambaran Kerja Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

- a. Untuk meningkatkan rasa ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air khususnya bagi Generasi Muda di Kabupaten Bangka dilaksanakan pembentukan Paskibraka. Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila yang dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan dan kedisiplinan yang menunjang nilai kebangsaan, cinta tanah air persatuan dan kesatuan dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Pelaksanaan Program Paskibraka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres No. 51 Tahun 2022 telah mengamanatkan kepada Badan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka secara Nasional.

Program Paskibraka terdiri atas pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas duta pancasila, pembinaan lanjutan purnapaskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas duta pancasila, pembinaan lanjutan purnapaskibraka duta pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka.

Pelaksanaan Paskibraka mengacu pada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 tahun 2023 (peraturan BPIP NO. 3/2022), BPIP perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai panduan teknis bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka Tahun 2024. Pelaksanaan pembentukan Paskibraka tahun 2024 dilakukan bebrapata tahap yaitu sebagai berikut :

Pembentukan Tahap Paskibraka Tingkat Kabupaten Bangka dimulai dari tahap persiapan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahapan Seleksi Administrasi melakukan pendaftaran melalui formulit pada tautan <https://bit.ly/Pembentukan> Paskibraka2024.

Berdasarkan Hasil Verifikasi seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 melalui pendaftaran online didapatkan hasil kelulusan Jumlah Calon Paskibraka Putra 124 da Putri 57 Capaska dan yang melanjutkan tahap

selanjutnya yang dinyatakan lulus berjumlah 115 Capaska Putra dan 56 capaska putri.

Peserta melakukan seleksi Administrasi Pendaftaran Capaska ke

<https://bit.ly/Pembentukan>



- b. Tahapan seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang berjumlah 181 Capaska. Jumlah yang dinyatakan lulus seleksi Pancasila dan wawasan Kebangsaan sebanyak 171 capaska. 115 capaska putra dan 56 capaska putri. yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024.

Tim Panitia melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tes seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di seluruh SMA di Kabupaten Bangka



- c. Tahapan selanjutnya bagi Capaska yang telah lulus seleksi Pancasila dan wawasan kebangsaan yaitu seleksi Tes Intelegensia Umum yang dilaksanakan di Sekolah masing masing di seluruh Kabupaten Bangka. Badan Kesbangpol dan Tim Panitia Seleksi mengawasi pelaksanaan tes intelegensia. Yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024.

Tim Panitia melakukan Pengawasan Tes Intelegensia yang dilakukan di seluruh SMA di Kabupaten Bangka



- d. Peserta Paskibraka yang telah lolos seleksi selanjutnya mengikuti seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024. Peserta seleksi kesehatan berjumlah 168 capaska dan dinyatakan lulus tes kesehatan sebanyak 154 capaska. Yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024.

**Tim Panitia melakukan Seleksi Kesehatan yang dilaksanakan di Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**



- e. serta yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan selanjutnya mengikuti tahapan seleksi Tes Parade. Tes parade berjumlah 154 capaska terdiri dari 70 capaska putra dan 30 capaska putri. yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024.

**Tim Panitia melakukan Seleksi Tes Parade yang dilaksanakan di Lapangan
Bina Satria Sungailiat**



- f. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tes parade selanjutnya mengikuti seleksi PBB sebanyak 100 capaska. Seleksi PBB dilaksanakan pada 04 Maret 2024.

Tim Panitia melakukan Seleksi PBB yang dilaksanakan di Lapangan Bina Satria Sungailiat



- g. Setelah tahap seleksi PBB peserta yang dinyatakan lulus mengikuti Seleksi Kesampataan yang diikuti 100 capaska yang dinyatakan lulus 70 capaska putra dan 30 capaska putri yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2024.

Tim Panitia melakukan Seleksi Kesampataan yang dilaksanakan di Lapangan Bina Satria Sungailiat



- h. Seleksi selanjutnya seleksi Kepribadian yang diikuti 100 capaska. Yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2024.

Tim Panitia dan Badan Kesbangpol melakukan Tes Kepribadian yang dilaksanakan di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka



- i. Setelah keseluruhan tahap seleksi yang dihasilkan 15 Paskibraka Putra dan 15 Paskibraka Putri, selanjutnya dilakukan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d 01 Agustus 2024.

**Kegiatan Tantangan Memasuki Diklat Paskibraka di Hotel Manunggal
(31 Juli – 01 Agustus 2024)**



➤ **Latihan Penguasaan Lapangan (08 Agustus – 15 Agustus 2024)**



➤ **Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (15 Agustus 2024)**



➤ Pelaksanaan Penaikan dan Penurunan Pengibaran Bendera Pusaka (17 Agustus 2024)



- a. Setelah Rangkaian keseluruhan Paskibraka telah selesai. Badan Kesbangpol menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan Pengibar Bendera Pusaka 17 agustus 2024 dan Hari lahir Pancasila 1 Juni 2024..



b. Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekonomi

Peran dan Fungsi FKUB sebagai Penguat Kerukunan dan Kesejahteraan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 bahwa FKUB menjalankan tugasnya sebagai pemelihara dan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Sedangkan Kabupaten Bangka untuk menjalankan tugas dan fungsi FKUB di Kabupaten Bangka memberikan bantuan Hibah untuk FKUB. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 07 Tahun 2022 tentang tata cara pengelolaan Hibah yang besumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka dan berdasarkan Keputusan Sekjen Kementrian Agama Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bidang kerukunan Umat Bergama pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi dan Provinsi/Kota.

Kegiatan Badan Kesabangpol dan FKUB yang menunjang Kerukunan dan Kesejahtera di Kabupaten Bangka



Lapo

po



Sosialisasi Kelenteng Amal Utama Pemali



Sosialisasi Gereja Masa Depan Cerah Sungai Ledeng Sungailiat



Dialog antar tokoh lintas agama se- Kabupaten tanqqal 14 November



Kunjungan FKUB ke FKUB Provinsi tanggal 07 November 2024



Kunjungan FKUB FKUB Bangka Ke FKUB Bandung 18-20 Nov 2024

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tanggal 05 Agustus 2019.

Anggaran Hibah yang dilontarkan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu :

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
1	KPU KAB BANGKA	28.323.243.000	Salur 100 Persen
2	BAWASLU KAB BANGKA	9.284.308.000	Salur 100 Persen
3	POLRES BANGKA	4.328.018.000	Salur 100 Persen
4	KODIM 0413 / BANGKA	1.349.729.000	Salur 100 Persen
	JUMLAH	43.285.298.000	

Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pengelolaan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

Data Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 :

KPUD Kabupaten Bangka :

1. Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) Sebanyak 455 TPS untuk 8 Kecamatan
2. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Sebanyak 40 Orang Untuk 8 Kecamatan
3. Sekretariat PPK Sebanyak 24 Orang Untuk 8 Kecamatan
4. PPS (Panitia Pemungutan Suara) Sebanyak 243 Orang Untuk 81 Kelurahan/Desa
5. Sekretariat PPS Sebanyak 243 Orang Untuk 81 Kelurahan/Desa
6. DPS (Daftar Pemilih Sementara) Sebanyak 238.386 Pemilih Untuk 8 Kecamatan
7. Pemutakhiran Daftar Pemilih (Belum Final) Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebanyak Satu Pasangan Calon (H. Mulkan, SH, MH - Ramadian).

BAWASLU Kabupaten Bangka :

1 . Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)

Sebanyak 24 Orang Untuk 8 Kecamatan

2. Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

Sebanyak 81 Orang Untuk 81 Kelurahan/Desa

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2024

1. Dukungan Alokasi Dana Hibah Pilkada :

2. Dukungan Penugasan Pegawai Pemkab Bangka Pada Sekretariat PPK di tingkat Kecamatan maupun PPS di tingkat Kelurahan /Desa

3. Dukungan Kelancaran Transportasi (Untuk Penertiban APK pada saat masa tenang)

Rapat / Kegiatan Dalam Rangka Persiapan Pilkada 2024 Pengamanan Pilkada Serentak tanggal 14 Agustus 2024



Rapat Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Dan Perubahan Rincian Penggunaan Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024



: Sosialisasi Perpanjangan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024



Rapat Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Pergeseran/Revisi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024



Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 03 September 2024



Pemerintah Kabupaten Bangka Melontarkan Anggaran Hibah dari tahu 2023 dan 2024 dengan pagu Rp. 43.285.298.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024. Badan Kesbangpol Menyiapkan Nota Kespakatan dengan Penerima Hibah (NPHD). Adapun dokumentasi penandatanganan NPHD KPU, Bawaslu dan TNI dan Polri.

Penandatanganan NPHD Hibah TNI dan Polri



Penandatanganan NPHD Hibah Pilkada dengan Bawaslu



Penandatanganan NPHD Hibah Pilkada dengan KPU Bangka



Badan Kesbangpol melakukan Pemantauan Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan dan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur/Bupati pada tanggal 27 November 2024.

Badan Kesbangpol mengadakan Rapat Persiapan Pemantauan Piemilu tanggal 14 Februari 2024



**Badan Kesbangpol mengadakan
Pemantauan Pemilu ke Desa Berbura Kec. Riau Silip tanggal 14 Februari 2024**



**Badan Kesbangpol mengadakan
Pemantauan Pilkada ke Desa Puding Kec. Puding Besar tanggal 27 November 2024**



**Badan Kesbangpol mengadakan
Pemantauan Pilkada ke Desa Riau Kec. Riau Silip tanggal 27 November 2024**



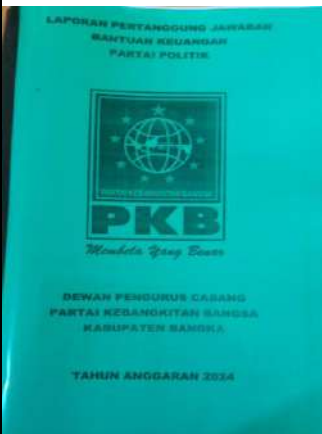

- b. Untuk mendukung peningkatan partisipasi politik perlu didukung dengan pemberian pembinaan bagi partai politik. Dukungan Kabupaten Bangka dalam mendukung meningkatnya pendidikan politik di Kabupaten Bangka dengan melakukan Pemberian anggaran Hibah Verifikasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dengan ketentuan Partai Politik yang mendapatkan Kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu dan bantuan kepada Partai politik setiap tahun anggaran. Serta menerima laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang di laporkan kepada Bupati Bangka.

Sedangkan acuan Peghitungan Hibah Parpol berdasrakan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Badan Kesbangpol mengadakan Pembinaan dan Verifikasi Keuangan Partai Politik



Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Partai Politik

No.	Laporan Pertanggungjawaban Parpol	Keterangan		Laporan Pertanggungjawaban Parpol	Keterangan
1.		Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai PKB	2.		Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai Perindo
		Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai PDI Tahap I			Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai Nasden
		Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai PPP			Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai Golongan Karya

	<p>Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai Golongan Gerindra</p>			<p>Laporan Pertanggungjawab an Verifikasi Keuangan Partai PKP</p>
	<p>Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan Partai Hanura</p>			<p>Laporan Pertanggungjawab an Verifikasi Keuangan Partai PAN</p>
	<p>Laporan Pertanggungjawaban Verifikasi Keuangan PDI Tahap 2</p>			<p>Laporan Pertanggungjawab an Verifikasi Keuangan Partai Demokrat</p>

a. Kegiatan Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 40 bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas, serta Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang

Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum bahwa Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Ormas atau badan/lembaga. Oleh karena itu Badan Kesbangpol melakukan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan Data keberadaan Ormas di Kabupaten Bangka bahwa Ormas yang aktif di Kabupaten Bangka berjumlah 75 ormas sedangkan ormas yang terdaftar 79 ormas.

Adapun tujuan dilaksanakan Sosialisasi ini yaitu untuk:

1. Memberikan informasi tentang regulasi yang berhubungan dengan Ormas
2. Meningkatkan pemahaman terhadap fungsi, tujuan, peran Ormas.
3. Memberikan informasi tentang kerjasama, fasilitasi dan pendaftaran Ormas di Kabupaten Bangka.

no.	Dokumentasi Sosialisasi Ormas	Keterangan
		Keban Kesbangol dan Kabid Kesbangpol Beserta Pemerintahan Daerah melakukan Sosialisasi Pengawasan dan keberadaan Ormas di Kabupaten Bangka
		Pembahasan mengenai Keberadaan Ormas di Kabupaten Bangka dengan peserta 40 orang yang terdiri dari ormas yang ada di Kabupaten Bangka

	<p>Tanya Jawab SDA dengan Narasumber Provinsi</p>
	<p>Paparan Materi yang disampaikan Kaban Kesbangpol Kab. Bangka dan Provinsi Bangka Belitung</p>
	<p>Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi (1 laporan)</p>

4. Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial

a. Kegiatan Monitoring Pengawasan Orang Asing yang ada di Kabupaten Bangka

Badan Kesbangpol melakukan Pengawasan dan Izin Tinggal Orang asing yang berada di 7 Desa di Kabupaten Bangka. Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah. Menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab Bupati untuk membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan berdasarkan Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman



Pemantauan Orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah.

Dokumen Administrasi dan tindakan lapangan dalam pemantauan Orang asing berkaitan dengan :

- a. Dokumen Keimigrasian
- b. Pengaduan Masyarakat
- c. Berita Media Masa
- d. Dokumen Perijinan dari Instansi Pemerintah yang terkait
- e. Hasil wawancara dengan orang asing yang bersangkutan.

Kelengkapan Berkas yang di Verifikasi Badan Kesbangpol bekerjasama dengan instansi terkait (Imigrasi, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, BIN, Pasi Intel, Intel Polres) yaitu Paspor, Visa, Tanda Masuk wilayah Indonesia, Tanda keluar wilayah Indonesia, Izin tinggal.

KEGIATAN RAPAT DAN PEMANTAUAN ORANG ASING BADAN KESBANGPOL DENGAN TIM TERPADU PENANGANAN ORANG ASING TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA

N O.	Hari/tanggal	Kegiatan	Peserta	Dokumenatsi
1.	Rabu, 08 Mei 2024	Rapat Pemantauan Orang asing di ruang sekda	Asisten Pemerintahan dan kesra Staf ahli bupati bidang politik dan pemerintahan Bappeda Kabupaten Bangka Bankesbangpol Kabupaten Bangka Dindukcapil Kabupaten Bangka Disperindag Kabupaten Bangka Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Intel Polres Intel Kodim Lanal Babel BAIS, BIN	
2.	Selasa, 14 Mei 2024	Rapat Evaluasi dokumen pemantauan orang asing PT. Gunung Pelawan Lestari Kecamatan Belinyu dan Verifikasi Lapangan ke Kantor PT.	Bankesbangpol Kabupaten Bangka Disperindag Kabupaten Bangka Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Intel Polres Intel Kodim Lanal Babel BAIS, BIN	

		GunungPelawan Lestari		
3	Kamis, 16 Mei 2024	Rapat Evaluasi dokumen pemantauan orang asing PT. THEPKecamatan Pemali dan Verifikasi Lapngan ke Kantor PT. THEP	Bankesbangpol Kabupaten Bangka Disperindag Kabupaten Bangka Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Intel Polres Intel Kodim Lanal Babel BAIS, BIN	 
4	Selasa, 21 Mei 2024	Rapat Evaluasi dokumen pemantauan orang asing UPLB PT. TIMAH Kecamatan Belinyu dan Verifikasi Lapngan ke Kantor UPLB PT.TIMAH	Bankesbangpol Kabupaten Bangka Disperindag Kabupaten Bangka Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Intel Polres Intel Kodim Lanal Babel BAIS, BIN	 
5	Senin, 03 Juni 2024	Rapat Evaluasi dokumen pemantauan orang asing PT. Bahari Makmur Sejahtera dan PT. Putra Prima Mineral Mandiri Kecamatan Merawang dan Verifikasi Lapngan ke Kantor PT. Bahari Makmur Sejahtera dan PT. Putra Prima Mineral Mandiri	Bankesbangpol Kabupaten Bangka Disperindag Kabupaten Bangka Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Intel Polres Intel Kodim Lanal Babel BAIS, BIN	 
6	Selasa, 4 Juni 2024	Rapat Evaluasi dokumen pemantauan orang asing PT. Bahari Makmur Sejahtera dan PT. Putra Prima Mineral Mandiri Kecamatan Merawang dan Verifikasi Lapngan ke Kantor PT. Bahari Makmur Sejahtera dan PT. Putra Prima Mineral Mandiri	Bankesbangpol Kabupaten Bangka Disperindag Kabupaten Bangka Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Intel Polres Intel Kodim Lanal Babel BAIS, BIN	   
7	Kamis,	Rapat Evaluasi dokumen	Bankesbangpol Kabupaten Bangka	 

4 Juli 2024	pemantauan orang asing PT. Gunung Maras Lestari (GML) dan Verifikasi Lapngan ke Kantor PT. Gunung Maras Lestari (GML)	Disperindag Kabupaten Bangka Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Intel Polres Intel Kodim Lanal Babel BAIS, BIN	
-------------	---	--	--

b. Badan Kesbangpol dalam mencegah potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Bangka dilakukan dengan melakukan Pemantauan serta Penanganan pengawasan dini masyarakat. Potensi Konflik yang terjadi di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebanyak **115 Kasus** yang terdiri dari bermacam – macam kasus seperti: Narkoba, Mencuri, Sengeкта Tanah dan lain sebagainya, tetapi sudah dilakukan penanganan sehingga potensi konflik sudah bisa diselesaikan. Penanganan potensi tergantung potensi yang terjadi. Adapun kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam penanganan potensi Konflik di kabupaten Bangka berdasarkan penjelasan kegiatan di bawah ini :

Dokumentasi Penanganan Potensi Konflik yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama dengan Instansi terkait

NO.	Hari/tanggal	Kegiatan	Peserta	Foto
		a. Potensi Konflik		
1	Rabu, 4 Juni 2024	Pemantauan Orang Asing ke PT. Gunung Maras Lestari (GML) Kec. Bakam	Kepala Bankesbangpol, Kabid Wasnas, Kabid Latpentaker, Kasubsi Intelijen Imigrasi, Intel Kodim, Intelkam Polres, Intel Kejari, BIN, BAIS, JFT, Staf , Honorer Wasnas	
		b. Penanganan Konflik		

1	Senin, 29 Juli 2024	Demo di depan Polres Bangka terkait permasalahan suara dalam Pemilihan Legislatif 2024 DPRD Prov.Kep.Babel Dapil Kab. Bangka dari PDI Perjuangan	Kepala Bankesbangpol, Polres Bangka, Kejari, Ormas simpatisan Caleg	
---	---------------------	--	---	---


NO	Hari/tanggal	Kegiatan	Peserta	Foto
1	Selasa, 15 Oktober 2024	Pertemuan dengan ex Narapidana terindikasi Teroris	Bankesbangpol Intel Polres Koramil BIN	
2	Rabu, 30 Oktober 2024	Workshop Literasi Media menghadapi dan mengenali informasi yang menyesatkan Menjelang Pilkada 2024 (Ruang Rapat Parai Tenggara Kantor Bupati Bangka)	Bankesbangpol Kasi Trantib Kecamatan se-kab. Bangka FKDM Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kecamatan dan Desa2	 
3	Kamis, 07 November 2024	Rapat Koordinasi bahan kajian Forkopimda terkait Pengedar Narkoba di Desa Penagan Kec.Mendo Barat (Ruang Rapat Bankesbangpol)	BNN Kab. Bangka Polres Bangka Kodim 0413 Bangka Lanal Babel BAIS, BIN Sekcam Mendo Barat Kadus se- Desa Penagan	 

4	Jumat, 06 Desember 2024	Rapat koordinasi penguatan kewaspadaan dini di daerah (Ruang Rapat Bankesbangpol)	Bankesbangpol Kejaksaan Negeri Kantor Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang Kasi Trantib Kecamatan se-kab. Bangka Lurah/Kades se-Kab. Bangka Staf Kec, Kel dan Desa	
---	-------------------------------	--	--	--

c. Kegiatan Forkopimda

Badan Kesbangpol melakukan Rapat Forkopimda dengan Instansi terkait, Instansi yang mengikuti rapat forkopimda dalam mengatasi Potensi konflik di Kabupaten Bangka terdiri dari Ketua DPR Kabupaten, Kapolres, Kajari, Komando Kodim, Komandan LANAL . adapun kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol dengan penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bangka dilakukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Adapun Pembahasan Forkopimda yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam menangani Potensi Konflik di Kabupaten Bangka dengan Instansi terkait berdasarkan penjelasan dibawah Ini :

.	Hari/tanggal	Kegiatan	Peserta	Foto
1.	Jum'at, 19/07/2024	Rapat Persiapan menjelang PILKADA Bulan November 2024 (di Kafe Lacosta Air Angir Merawang)	Forkopimda, Bankesbangpol Penyelenggara Pemilu	

2.	Jum'at, 02/08/2024	Coffee Morning Jelang Pilkada Serentak tahun 2024	Forkopimda, Bawaslu, KPU Kepala OPD Awak Media	
3.	Kamis, 15/08/2024	Pengukuhan Paskibraka Tahun 2024 (Gedung Pertemuan Graha Maras Kantor Bupati Bangka)	Forkopimda Kepala OPD Pemkab Bangka Paskibraka Orang Tua Paskibraka	
4.	Sabtu, 17/08/2024	Upacara Peringatan HUT RI ke 79 (Halaman Kantor Bupati Bangka)	Forkopimda Kepala OPD Pemkab Bangka Anggota Polres & TNI PKK, Dharma Wanita, GOW Mahasiswa, Ormas, veteran Siswa/Siswi SD, SMP, SMA Orang Tua Paskibraka	
5	Selasa, 03/09/2024	Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur & Wagub, Bupati & Wabup, Walikota & Wakil Walikota serentak tahun 2024 Prop.Kep.Babel (Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur)	Forkopimda Propinsi, Walikota/Bupati se - Prop Kep Babel OPD Prov. Kep. Babel	

KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KAB. BANGKA

PERIODE SEPTEMBER S/D DESEMBER 2024

N O.	Hari/tanggal	Kegiatan	Peserta	Foto
1.	Selasa, 17 September 2024	Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2029	Forkopimda Kab. Bangka Kepala OPD Pemkab Bangka Dharma Wanita, GOW,PKK Mantan Anggota Dewan Partai Politik ORMAS Keluarga Anggota Dewan yg dilantik Tokoh Masyarakat & Tokoh Pemuda	
2.	Senin, 25 November 2024	Pendistribusia n logistik Pemilu Pilkada ke Kecamatan di Kab. Bangka	Forkopimda Satpol PP Bankesbangpol Penyelenggara Pemilu	
3.	Selasa, 26 November 2024	Pemusnahan logistik yang rusak	Forkopimda Satpol PP Bankesbangpol Penyelenggara Pemilu	
4.	Rabu, 27 November 2024	Melakukan Pemantauan Pemilu ke TPS- TPS yang berada di wilayah Kecamatan Sungailiat	Forkopimda Kepala OPD Pemkab Bangka Anggota Polres & TNI	

Badan Kesbangpol menyusun Laporan Penanganan Orang asing dengan target 1 Laporan.



Kegiatan yang dilakukan Perencanaan dalam pencapaian target yang telah direncanakan yaitu

- a. Melakukan Evaluasi Rencana Aksi setiap Triwulan
Untuk meningkatkan Pencapaian Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik yang telah di rencanakan maka dapat dilakukan berbagai cara yaitu :

- 1. Menyusun Rencana Aksi atas Target Kinerja secara berkala.

Untuk meningkatkan Target Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Awal Tahap awal perencanaan kegiatan menyusun Rencana Aksi setiap Bidang. Dalam tahap penyusunan Rencana Aksi dilakukan dengan Rapat seluruh pegawai.

Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I

No.	Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Tr 1	
		

Evaluasi Rencana Aksi Triwulan 2

no.	Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Tr 2	
		

Evaluasi Rencana Aksi Triwulan 3

no.	Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Tr 3	
		

Evaluasi Rencana Aksi Triwulan 4

no.	Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Tr 4	
		

2. Melakukan Monitoring Pencapaian Kinerja secara Periodik.

Dalam meningkatkan Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan Monitoring ke seluruh bidang terhadap rencana aksi kegiatan yang telah direncanakan dan juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan. Tujuan Monitoring untuk mengevaluasi permasalahan di lapangan terkait hambatan dalam pencapaian kinerja. Monitoring dilakukan dengan ikut serta turun dalam pelaksanaan kinerja.

3. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan LAKIP

Untuk melihat tercapai atau tidaknya Rencana Aksi yang telah direncanakan di awal tahun maka Badan Kesbangpol melakukan Rapat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024, secara umum dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar sudah dapat dipenuhi. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Bangka yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk mewujudkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka. Tahun 2024 adalah Tahun Pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026).

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan 3 Sasaran Strategis 3 indikator Kinerja, 6 Program, 13 Kegiatan dan 22 sub Kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2024 diperoleh capaian ke enam program yaitu sebagai berikut :

Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka secara keseluruhan berhasil menyerap sebesar 98,87% dari total anggaran sebesar Rp.33.806.315.468,- dengan rincian penyerapan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi penyerapan sebesar 95,52% dengan sisa anggaran Rp.128.927.677,- dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menyumbang sisa anggaran paling besar yaitu Rp.95.363.135,00
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan realisasi penyerapan sebesar 95,42% dengan sisa anggaran Rp.46.838.671,00 dengan subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 46.838.671,00.
- c. Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan realisasi penyerapan sebesar 99,40%.

- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan realisasi penyerapan sebesar 87,92% dengan sisa anggaran Rp.2.415.106,00. Sisa anggaran pada efisiensi Belanja Alat tulis Kantor.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan realisasi penyerapan sebesar 98,89% dengan sisa anggaran Rp.1.720.420,00.
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Konflik Sosial dengan realisasi penyerapan sebesar 75,90% dengan sisa anggaran Rp.23.565.342,00. pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya Juknis dari Kepmendagri bahwa Honorarium Tim Forkopimda tidak boleh dilakukan Pencairan Dobel anggaran sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Dalam perjalanannya, masih terdapat beberapa pelaksanaan program.kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang belum dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya Jumlah Pegawai Fungsional dan Pelaksana yang memiliki kualifikasi keahlian yang bersifat teknis.
- b. Keterbatasan Anggaran pada Badan Kesbangpol dalam pencegahan dan penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Bangka.

Terkait dengan pencapaian IKU yang belum memenuhi target di dalam dokumen RPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa IKU yang ditetapkan bukan murni atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sendiri, melainkan ada upaya dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Oleh karena itu, meskipun upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah maksimal, capaian IKU masih harus mempertimbangkan capaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Lainnya. Meskipun Demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Akan tetap berupaya agar capaian atas target IKU dapat terealisasi.

B. Saran.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti yang dijabarkan di atas, maka untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien agar output yang diharapkan dapat tetap tercapai yakni dengan mentransformasi pengumpulan data melalui sistem digital atau aplikasi pendataan ormas.
- 2) Perlu adanya penambahan tenaga pelaksana yang menguasai aplikasi komputer dan administrasi perkantoran untuk membantu bidang dalam menangani pekerjaan yang bersifat administratif.
- 3) Perlu adanya Penambahan Tenaga Teknis Lapangan untuk Inteligen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan deteksi dini, cegah dini dan penanggulangan konflik sosial.
- 4) Peningkatan koordinasi dan integrasi yang didukung oleh system kerja dan manajerial yang optimal.
- 5) Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana kerja yang memadai agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik
- 6) Arah kebijakan anggaran harus di fokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik
- 7) Peningkatan kerjasama dan komunikasi antara lembaga daerah, ormas, serta lembaga vertikal lainnya.
- 8) Perlunya penysunan jadwal pelaksanaan yang matang sehingga penyelesaian kegiatan lebih optimal.

.Laporan kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semuapihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN LAMPIRAN :



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMLAN, S.Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP.,M.H
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

M. HARIS AR, AP.,M.H

Sungailiat, 29 Januari 2024
PIHAK PERTAMA


ROMLAN, S.Ag
PEMBINA
NIP. 19741029 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	%	80
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	%	70
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/Nilai	B (67,34)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.720.900.248,00	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.030.000.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	27.144.383.200,00	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	165.000.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	125.000.000,00	APBD
TOTAL		31.205.283.448,00	

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP., M.H

Sungailiat, 29 Januari 2024
PIHAK PERTAMA



ROMLAN, S.Ag
PEMBINA
NIP. 19741029 200604 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M. Si
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008

Sungailiat, 29 Januari 2024
PIHAK PERTAMA


SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 119830909 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Nilai % % Dokumen Laporan	24.57 10.78 100 100 8 12
2	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI 1. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar 2. Persentase Pelaporan Aset yang disusun Sesuai Standar. 1. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	% % % Orang Dokumen Laporan	0 100 100 18 12 42

3.	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	64,78
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	1. Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	%	100
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	%	100
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3. Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	43,48
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7
4.	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai	3.00
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	1. Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12
5.	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai	3.00
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1. Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
6.	Sasaran Program : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah 1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	% % Unit unit	27,08 100 11 11
7.	Sasaran Program : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Persentase barang milik daerah yang dipelihara 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	% % Unit Unit unit	27,08 58,33 2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Unit Kendaraan Roda dua 20 1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.530.800,00	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.530.800,00	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.530.800,00	APBD

2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.830.807.540,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.800.807.540,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.693.199,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.122.387,00	APBD
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.785.406,00	APBD
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.785.406,00	APBD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.634.450,00	
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	49.488.660,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.145.790,00	APBD
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.714.853,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	305.449.188,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.914.853,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.350.812,00	APBD
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.769.406,00	
a..	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.249.406,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.370.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.150.000,00	APBD
TOTAL		2.720.900.248,00	

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 119830909 200112 2 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYANI, S.SOS, M. Si
Jabatan : Kabid.Wasnas dan Penanganan Konflik
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008

PIHAK PERTAMA


SURYANI, S.SOS, M. Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan yang disusun pada tahun berkenan	% % % Laporan Dokumen	100 100 12,35 3 1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
I.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	40.000.000,00	APBD
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	40.000.000,00	APBD


a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.000.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	APBD
TOTAL		125.000.000,00	

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008

PIHAK PERTAMA


SURYANI, S.SOS, M. Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIAS, ST
Jabatan : Kabid.Politik Dalam Negeri dan Ormas
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008


LIAS, ST
PEMBINA/ IV a
NIP. 19701212 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	%	100
		Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	%	35
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	%	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula	Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik	%	36,00
	Sasaran Sub Kegiatan : <i>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Orang	207.440
	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan yang disusun pada tahun berkenan</i>	Laporan	1
2	Sasaran Program : Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	Persentase Ormas yang aktif	%	100
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi	%	33,33

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	40
---	---	-------	----

	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
I.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	27.144.383.200,00	APBD
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	27.144.383.200,00	APBD
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20.000.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	200.000.000,00	APBD
II.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000,00	APBD
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000,00	APBD
	TOTAL	27.164.383.200,00	

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008

Sunggailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


LIAS, ST
PEMBINA/ IV a
NIP. 19701212 199903 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : Kabid.Ideologi Wasbang, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 1989031 003

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Meningkatnya Koordinasi terhadap Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Meningkatnya Pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	% % % % orang	80 100 100 33,33 60
	Sasaran Program : Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	% % % Orang Forum	100 100 33,33 1334 1


No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.030.000.000,00	APBD
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.030.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	1.030.000.000,00	APBD
II.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	165.000.000,00	APBD
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	165.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	165.000.000,00	APBD
TOTAL		166.030.000,00	

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA/ IV a
NIP. 19741029 200604 1 008

Sunggailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 1989031 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi

Nama : AGNES ANGGOROWATI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


AGNES ANGGOROWATI, A.Md
PENATA / III c
NIP. 19830125 200604 2 006

PERJANJIAN KINERJA

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap 1. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian 2. Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	% % Orang Paket Orang	100 100 43,48 1 7
2.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	% Laporan Dokumen Dokumen	100 12 12 12
3	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% Laporan	100 12

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
4.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja		Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Mebel	1.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11
5.	Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	58,33
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Unit Kendaraan Roda dua
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.693.199,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.122.387,00	APBD
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.785.406,00	APBD
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.785.406,00	APBD

3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.634.450,00	
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	49.488.660,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.145.790,00	APBD
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.714.853,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	305.449.188,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.914.853,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.350.812,00	APBD
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.769.406,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.249.406,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.370.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.150.000,00	APBD
TOTAL		843.561.908,00	

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

AGNES ANGGOROWATI, A.Md
PENATA / III c
NIP. 19830125 200604 2 006



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELIYANA, S.AP
Jabatan : ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN)

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

ELIYANA, S.AP
PENATA / III c
NIP. 19830221 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan	8 12
2	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Orang Dokumen Laporan	18 12 42

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

ELIYANA, S.AP
PENATA / III c
NIP. 19830221 200501 2 006



: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RULLY REDHANI, S.AP, M.Si
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : LIAS, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004**

**RULLY REDHANI, S.AP, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19730726 200312 1 005**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	40

PIHAK KEDUA



LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



RULLY REDHANI, S.AP, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19730726 200312 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2

EN

BANGKA PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARTONO, S.Pd. Jas, M. Pd
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 198903 1 003

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

SUPARTONO, S.Pd. Jas, M. Pd
PENATA / III c
NIP. 19780604 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	60
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang Forum	1334 1

PIHAK KEDUA



ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 198903 1 003

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



SUPARTONO, S.Pd. Jas, M. Pd
PENATA / III c
NIP. 19780604 201001 1 007



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CORRY KRISYHNA, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : LIAS, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA

LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004

PIHAK PERTAMA

CORRY KRISYHNA, SH
PENATA TK I / III d
NIP. 19690913 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenaan yang disusun pada tahun berkenaan	Orang Laporan	207.440 1

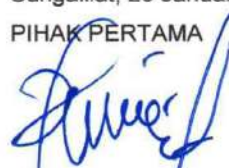
PIHAK KEDUA



**LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004**

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



**CORRY KRISYANA, SH
PENATA TK I / III d
NIP. 19690913 200604 2 011**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERNAWATI, A. Md
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 198903 1 003

Sunggailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

ERNAWATI, A. Md
PENATA / III c
NIP. 19720110 200604 2 014

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan bagi Paskibraka	1. Terkumpulnya Bahan kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Dokumen	2
		2. Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Laporan	2
		3. Paskibraka yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Orang	30
	Telaksananya Hibah FKUB	4. Tersdianya Dokumen Hibah FKUB	Dokumen	1
		5. Tersediannya Laporan Hasil Penggunaan Hibah FKUB	Laporan	1

PIHAK KEDUA



ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 198903 1 003

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



ERNAWATI, A. Md
PENATA / III c
NIP. 19720110 200604 2 014



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESTIA, S.KOM
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
sebagai PIHAK PERTAMA

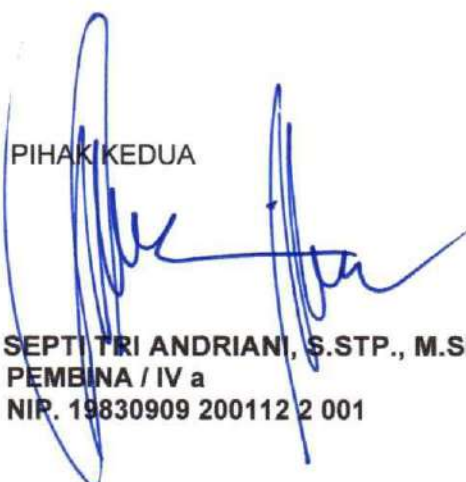
Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 29 Januari 2024
PIHAK PERTAMA



RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA TK I / III b
NIP. 19880120 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	1. Tersedianya Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	orang	18
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2. Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	42

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA TK I / III b
NIP. 19880120 201101 2 002



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFUDIN
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 198903 1 003

SYARIFUDIN
PENATA MUDA/ III a
NIP. 19680527 200606 1 003

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan bagi Paskibraka Telaksananya Hibah FKUB	1. Terkumpulnya Bahan kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Dokumen	2
		2. Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Laporan	2
		3. Paskibraka yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Orang	30
		4. Tersediannya Dokumen Hibah FKUB	Dokumen	1
		5. Tersediannya Laporan Hasil Penggunaan Hibah FKUB	Laporan	1

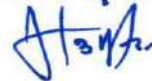
PIHAK KEDUA



ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 198903 1 003

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



SYARIFUDIN
PENATA MUDA/ III a
NIP. 19680527 200606 1 003



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMDANI
Jabatan : PELAKSANA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SURYANI, S.SOS, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA


SURYANI, S.SOS, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PIHAK PERTAMA


ROMDANI
PENATA MUDA / III a
NIP. 19730926 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Monitoring Penanganan orang asing	1. Tersusunnya laporan hasil Kegiatan monitoring orang asing 2. Terkumpulnya dokumen pelaksanaan monitoring orang asing 3. Terkumpulnya bahan pelaksanaan Monitoring orang asing	Laporan Dokumen Dokumen	3 2 1
2.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya laporan hasil Kegiatan Forkopimda 2. Terkumpulnya dokumen pelaksanaan Kegiatan Forkopimda 3. Terkumpulnya bahan pelaksanaan Forkopimda	Laporan Dokumen Dokumen	1 2 2

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA



SURYANI, S.SOS, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PIHAK PERTAMA



ROMDANI
PENATA MUDA / III a
NIP. 19730926 200701 1 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERI JUMAWI
Jabatan : PELAKSANA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SURYANI, S.SOS, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA,


SURYANI, S.SOS, M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PIHAK PERTAMA


FERI JUMAWI
PENGATUR TK I/ II d
NIP. 19780604 201001 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMLAN, S.Ag.
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP.,M.H.
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 11 November 2024

PIHAK PERTAMA



ROMLAN, S.Ag.

PEMBINA TK.I

NIP. 19741029 200604 1 008

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP.,M.H.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	%	80,00	80,00
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	%	70,00	70,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/ Nilai	B (67,34)	B (69,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.720.900.248	2.880.091.563	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.030.000.000	1.021.900.000	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	27.144.383.200	29.631.082.984	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	165.000.000	155.460.420	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	125.000.000	97.780.501	APBD
TOTAL		31.205.283.448	33.806.315.468	

Sungailiat, 11 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


M. HARIS AR, AP.,M.H.


ROMLAN, S.Ag.
PEMBINA TK. I
NIP. 19741029 200604 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP, M. Si
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 19741029 200604 1 008

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA


SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP.,M.Si
PEMBINA TK I IV/B
NIP. 119830909 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<p>Sasaran Program : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol</p> <p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol</p> <p>Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol</p> <p>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</p> <p>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p>	<p>24.57</p> <p>10.78</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>8</p> <p>12</p>
2	<p>Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</p>	<p>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</p> <p>1. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</p> <p>2. Persentase Pelaporan Aset yang disusun Sesuai Standar.</p> <p>1. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani</p> <p>2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>Orang</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p>	<p>0</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>18</p> <p>12</p> <p>42</p>

3.	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	64,78
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	1. Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	%	100
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	%	100
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3. Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	43,48
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7
4.	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai	3.00
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	1. Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12
5.	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai	3.00
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1. Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
6.	Sasaran Program : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	27,08
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja		Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Mebel	1.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11
7.	Sasaran Program : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	27,08
	Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	58,33
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Unit Kendaraan Roda dua
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.530.800,00	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.530.800,00	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.530.800,00	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.830.807.540,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.800.807.540,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.693.199,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.122.387,00	APBD
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.785.406,00	APBD
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.785.406,00	APBD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.634.450,00	
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	49.488.660,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.145.790,00	APBD
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.714.853,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	305.449.188,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.914.853,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.350.812,00	APBD
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.769.406,00	
a..	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.249.406,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.370.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.150.000,00	APBD
	TOTAL	2.720.900.248,00	

PIHAK KEDUA



ROMLAN, S. Ag
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 19741029 200604 1 008

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA



SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 119830909 200112 2 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIAS, ST
Jabatan : Kabid.Politik Dalam Negeri dan Ormas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 19741029 200604 1 008

PIHAK PERTAMA


LIAS, ST
PEMBINA IV/A
NIP. 19701212 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan yang disusun pada tahun berkenan	% % % Orang Laporan	100 35 100 36,00 207.440 1
2	Sasaran Program : Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi	% %	100 33,33

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	40
---	---	-------	----


	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
I.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.631.082.984,00	APBD
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	27.144.383.200,00	APBD
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	29.504.664.386,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	126.418.598,00	APBD
II.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000,00	APBD
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000,00	APBD
	TOTAL	29.651.082.984,00	

Sunggailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA


R. M. L. N. S. Ag
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 19741029 200604 1 008

PIHAK PERTAMA


LIAS, ST
PEMBINA IV/A
NIP. 19701212 199903 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : Kabid.Ideologi Wasbang, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

ROMLAN, S. Ag
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 19741029 200604 1 008

PIHAK PERTAMA

ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA IV/A
NIP. 19680329 1989031 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	% % orang	80 100 60
	Sasaran Program : Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dari budaya yang dihasilkan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	% % Orang/Forum	100 100 1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.021.900.000,00	APBD
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.021.900.000,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan.	1.021.900.00,00	APBD

II.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	155.460.420,00	APBD
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	155.460.420,00	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	155.460.420,00	APBD
TOTAL		1.177.360.420,00	

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA



ROMLAN, S. Ag
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 19741029 200604 1 008

PIHAK PERTAMA



ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA IV/A
NIP. 19680329 1989031 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYANI, S.SOS, M. Si
Jabatan : Kabid.Wasnas dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ROMLAN, S. Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

**ROMLAN, S. Ag
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 19741029 200604 1 008**

PIHAK PERTAMA

**SURYANI, S.SOS, M. Si
PEMBINA IV/A
NIP. 19711117 200003 2 004**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan yang disusun pada tahun berkenan	% % % Laporan Dokumen	100 100 12,35 1 1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
I.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	97.780.501,00	APBD
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	97.780.501,00	APBD
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33.040.000,00	APBD

b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	64.740.501,00	APBD
TOTAL		97.000.000,00	

PIHAK KEDUA


 ROMLAN, S. Ag
 PEMBINA TK I, IV/B
 NIP. 19741029 200604 1 008

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA


 SURYANI, S. SOS, M. SI
 PEMBINA IVA
 NIP. 19711117 200603 2 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGNES ANGGOROWATI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK II/IVb
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA

AGNES ANGGOROWATI, A.Md
PENATA III c
NIP. 19820629 200903 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap 1. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian 2. Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	% % Orang Paket Orang	100 100 43,48 0 2
2.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	% Laporan Dokumen Dokumen	100 12 12 12
3	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% Laporan	100 12

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
4.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja		Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Mebel	1.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2
5.	Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	58,33
	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	APBD
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.093.948,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.949.532,00	APBD
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.572.208,00	APBD
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.572.208,00	APBD
3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.023.050,00	

a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	49.488.660,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.534.390,00	APBD
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.032.322,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	328.677.614,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.014.853,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.339.855,00	APBD
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.456.208,00	
a..	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.086.208,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.370.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	APBD
TOTAL		800.355.528,00	

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I/ IVb
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA

AGNES ANGGOROWATI, A.Md
PENATA/ III c
NIP. 19820629 200903 2 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGNES ANGGOROWATI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I/ IVb
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA

AGNES ANGGOROWATI, A.Md
PENATA / III c
NIP. 19820629 200903 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	<p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai</p> <p>Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</p> <p>Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</p> <p>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>	<p>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</p> <p>1. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</p> <p>2. Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p>1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</p> <p>2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>Orang</p> <p>Paket</p> <p>Orang</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>43,48</p> <p>0</p> <p>2</p>
2.	<p>Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>	<p>Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</p> <p>1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>2. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>3. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>	<p>%</p> <p>Laporan</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p>	<p>100</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
3	<p>Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	<p>Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</p> <p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	<p>%</p> <p>Laporan</p>	<p>100</p> <p>12</p>

a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	49.488.660,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.534.390,00	APBD
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.032.322,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	328.677.614,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.014.853,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.339.855,00	APBD
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.456.208,00	
a..	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.086.208,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.370.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	APBD
TOTAL		800.355.528,00	

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I/ IVb
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA

AGNES ANGGOROWATI, A.Md
PENATA/ III c
NIP. 19820629 200903 2 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELIYANA, S.AP
Jabatan : ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN)

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I/ IV b
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA

ELIYANA, S.AP
PENATA / III c
NIP. 19830221 200501 2006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan	8 12
2	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Orang Dokumen Laporan	18 12 42

PIHAK KEDUA

SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I, IV b
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA

ELIYANA, S.AP
PENATA/ III c
NIP. 19830221 200501 2006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CORRY KRISYHNA, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : LIAS, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004


CORRY KRISYHNA, SH
PENATA TK I / III d
NIP. 19690913 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<p>Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan yang disusun pada tahun berkenan</p>	<p>Orang</p> <p>Laporan</p>	<p>207.440</p> <p>1</p>

PIHAK KEDUA



**LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004**

Sunggailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA



**CORRY KRISYHNA, SH
PENATA TK I / III d
NIP. 19690913 200604 2 011**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RULLY REDHANI, S.AP, M.Si
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : LIAS, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004


RULLY REDHANI, S.AP, M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19730726 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	40

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



LIAS, ST
PEMBINA / IV a
NIP. 19701212 199903 2 004



RULLY REDHANI, S.AP, M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19730726 200312 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARIDAH, S.IP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SURYANI, S.SOS., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

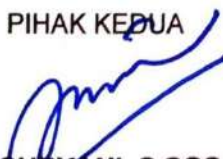
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA


SURYANI, S.SOS., M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PIHAK PERTAMA


PARIDAH, S.IP
PENATA/ III c
NIP. 19710920 200701 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan yang disusun pada tahun berkenan	Laporan Dokumen	3 1

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA


SURYANI, S.SOS., M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PIHAK PERTAMA


PARIDAH, S.IP
PENATA / III c
NIP. 19710920 200701 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARTONO, S.Pd. Jas, M. Pd
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

**ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA/ IV A
NIP. 19680329 198903 1 003**

PIHAK PERTAMA

**SUPARTONO, S.Pd. Jas, M. Pd
PENATA/ III C
NIP. 19780604 201001 1 007**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	60
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang/Forum	1

PIHAK KEDUA



**ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA/ IV A
NIP. 19680329 198903 1 003**

Sunggailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA



**SUPARTONO, S.Pd. Jas, M. Pd
PENATA/ III C
NIP. 19780604 201001 1 007**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERNAWATI, A. Md
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA/ IV a
NIP. 19680329 198903 1 003**

**ERNAWATI, A. Md
PENATA/ III c
NIP. 19720110 200604 2 014**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan bagi Paskibraka Telaksananya Hibah FKUB	1. Terkumpulnya Bahan kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Dokumen	1
		2. Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Laporan	1
		3. Paskibraka yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Orang	30
		4. Tersdianya Dokumen Hibah FKUB	Dokumen	1
		5. Tersediannya Laporan Hasil Penggunaan Hibah FKUB	Laporan	1

PIHAK KEDUA



**ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA/ IV a
NIP. 19680329 198903 1 003**

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA



**ERNAWATI, A. Md
PENATA/ III c
NIP. 19720110 200604 2 014**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESTIA, S.KOM
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I/IV b
NIP. 19830909 200112 2 001

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA


RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA TK I/III b
NIP. 19880120 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	1. Tersedianya Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	orang	18
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2. Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	42

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA


SEPTI TRI ANDRIANI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I/IV b
NIP. 19830909 200112 2 001

PIHAK PERTAMA


RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA TK I/III b
NIP. 19880120 201101 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFUDIN
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HAKIM, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

**ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA/ IV a
NIP. 19680329 198903 1 003**

PIHAK PERTAMA

**SYARIFUDIN
PENATA MUDA / III a
NIP. 19680527 200606 1 003**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan bagi Paskibraka	1. Terkumpulnya Bahan kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Dokumen	1
		2. Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Paskibraka dan Ketahanan Ekonomi	Laporan	1
		3. Paskibraka yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Orang	30
	Telaksananya Hibah FKUB	4. Tersediannya Dokumen Hibah FKUB	Dokumen	1
		5. Tersediannya Laporan Hasil Penggunaan Hibah FKUB	Laporan	1

PIHAK KEDUA



ABDUL HAKIM, SE
PEMBINA / IV a
NIP. 19680329 198903 1 003

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA



SYARIFUDIN
PENATA MUDA/ III a
NIP. 19680527 200606 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMDANI
Jabatan : PELAKSANA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SURYANI, S.SOS., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

SURYANI, S.SOS., M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PIHAK PERTAMA

ROMDANI
PENATA MUDA/ III a
NIP. 19710920 200701 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Monitoring Penanganan orang asing	1. Tersusunnya laporan hasil Kegiatan monitoring orang asing	Laporan	1
		2. Terkumpulnya bahan pelaksanaan Monitoring orang asing	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya laporan hasil Kegiatan Forkopimda	Dokumen	1
		2. Terkumpulnya dokumen pelaksanaan Kegiatan Forkopimda	Laporan	1

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA



**SURYANI, S.SOS., M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004**

PIHAK PERTAMA

**ROMDANI
PENATA MUDA/ III a
NIP. 19710920 200701 2 002**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERI JUMAWI
Jabatan : PELAKSANA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SURYANI, S.SOS., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

SURYANI, S.SOS., M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

PIHAK PERTAMA

FERI JUMAWI
PENGATUR TK I/ IId
NIP. 19780604 201001 1 007


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Monitoring Penanganan orang asing	1. Tersusunnya laporan hasil Kegiatan monitoring orang asing	Laporan	1
		2. Terkumpulnya bahan pelaksanaan Monitoring orang asing	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya laporan hasil Kegiatan Forkopimda	Dokumen	1
		2. Terkumpulnya dokumen pelaksanaan Kegiatan Forkopimda	Laporan	1

PIHAK KEDUA


SURYANI, S.SOS., M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19711117 200003 2 004

Sungailiat, 13 November 2024

PIHAK PERTAMA


FERI JUMAWI
PENGATUR TK II/ IId
NIP. 19780604 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp (0717) 93296
E-mail : [Kesbangpol.bgk1 @ gmail.com](mailto:Kesbangpol.bgk1@gmail.com)/Website : [www. Bangka go.id](http://www.Bangka.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NOMOR : 188.4/ 17.a /BANKESBANGPOL/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : Menimbang bahwa dalam rangka menetapkan ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dan menjamin konsistensi pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Sert D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Sert D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembarari Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 9 Sert D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bangka No. 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah tahun 2020 Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka);

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana Diktum Kesatu yaitu SOP tentang Penyusunan Data Kinerja;
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kedua yang tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka,



Drs. M. DALYAN AMRIE
Pembina Utama Muda/IV/C
NIP. 19670427 198603 1 002

<p style="text-align: center;">PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	NOMOR SOP	: 476/ /BANKESBANGPOL/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 22 Januari 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 01 Februari 2021
	DISAHKAN OLEH	:
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 2 Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kewenangan dalam menyusun data kinerja 2 Mengetahui tata cara pengumpulan data kinerja 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Buku Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat pengantar 2 Disposisi surat 2 Buku agenda 3 Tupoksi 4 Komputer 5 RKA OPD Tahun Anggaran 2020, RPJMD, Renstra OPD dan RKPD 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan Penyusunan Kinerja akan terlambat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data perencanaan Secara manual / elektronik 	

**IDENTIFIKASI JUDUL SOP
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Bangka
 Unit Kerja Eselon II : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Unit Kerja Eselon III : Sekretariat
 Unit Kerja Eselon IV : Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan	Mengkoordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran badan	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan	Data Kinerja	Penyusunan	Penyusunan Data Kinerja

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	:	Penyusunan Data Kinerja
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kaban
b. Kegiatan	:	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan
4. Scope (Ruang Lingkup)	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


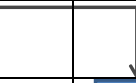
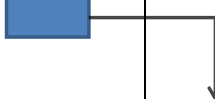
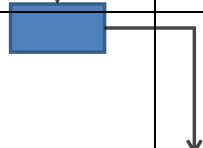
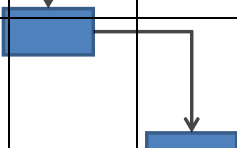


B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Penyusunan Data Kinerja
Langkah Awal	:	Kepala Badan menugaskan Sekretaris untuk menyusun Data Kinerja lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Langkah Utama	:	Seluruh Bidang menghimpun data Kinerja di masing-masing bidang, menyerahkan format isian Kinerja beserta data pendukung penyusunan Data Kinerja dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan
Langkah Akhir	:	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan menerima rekapitulasi data Kinerja

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal :	1	Kepala Badan menugaskan Sekretaris untuk menyusun Data Kinerja lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan untuk mengumpulkan data awal Laporan Kinerja
	3	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan menyusun personil tim penyusunan Data Kinerja, membuat jadwal kerja, membuat surat permintaan data Kinerja beserta format pengumpulan data dan mendistribusikan ke masing-masing bidang
Langkah Utama :	4	Seluruh Bidang menghimpun data Kinerja di masing-masing bidang, menyerahkan format isian Kinerja beserta data pendukung penyusunan Data Kinerja dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan
	5	Pengelola bahan perencanaan merekapitulasi seluruh data Kinerja dari masing-masing bagian dan menyerahkan kepada kasubbag perencanaan dan pelaporan
Langkah Akhir :	6	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan menerima rekapitulasi data Kinerja

FLOWCHART Penyusunan Data Kinerja

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KEPALA BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIS	KASUBBAG PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	BIDANG	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	Menugaskan Sekretaris Badan Kesbangpol untuk menyusun Data Kinerja lingkup Badan Kesbangpol						Surat Edaran Penyusunan LAKIN, Renstra, RKPD, DPA	5 menit	Disposisi Kaban	
2	Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan untuk mengumpulkan data awal Laporan Kinerja						Disposisi Kadin, Surat Edaran Penyusunan LAKIN, Renstra, RKPD, DPA	5 menit	Disposisi Sekretaris	
3	Menyusun personil tim penyusunan data kinerja, membuat jadwal kerja, membuat surat permintaan data LAKIN beserta format pengumpulan data dan mendistribusikan ke masing-masing bidang						Surat Edaran Penyusunan LAKIN, Renstra, RKPD, DPA	1 hari	SK TIM Data Kinerja, jadwal kerja, surat permintaan data Kinerja, form isian data Kinerja	Terkait dengan SOP Penyusunan SKKa. Dinas/Bupati
4	Menghimpun data Kinerja di masing-masing bidang, menyerahkan format isian Data Kinerja beserta data pendukung penyusunan Data Kinerja dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan						SK TIM LAKIN, jadwal kerja, surat permintaan data LAKIN, form isian data LAKIN	3 hari	Data LAKIN Per Bidang	
5	Merekapitulasi seluruh data Kinerja dari masing-masing bagian dan menyerahkan kepada Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan						Data LAKIN Per Bidang	2 hari	Rekapitulasi Data Kinerja Per Bidang	
6	Menerima rekapitulasi data Kinerja						Rekapitulasi Data LAKIN Per Bidang	1 jam	Rekapitulasi Data Kinerja Per Bidang	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KPU, BAWASLU,
TNI POLRI DAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANGKA

Jalan Pemuda No 2 Sungailiat



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

Nomor SOP	:	061.9/ 01 /BANKESBANGPOL/ I/2023
Tanggal Pembuatan	:	09 JANUARI 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	12 JANUARI 2023
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka	
Nama SOP	Pencairan Bantuan Keuangan Kepada KPU, BAWASLU, TNI POLRI DAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGKA	

Dasar Hukum











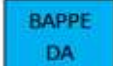

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;






















Kualifikasi Pelaksana

- A. Kompetensi
 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun tim dan anggaran
 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
 3. Mengetahui tata cara Pencairan Bantuan Keuangan
- B. Pendidikan
 1. Standar Pendidikan minimal pelaksana D4/S1

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja 2. Komputer, ATK 3. DPA, Renstra, Renja Badan, RAB 4. Surat tugas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

SOP : PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KPU, BAWASLU, TNI POLRI DAN PARTAI POLITIK

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET
		KPU / Bawaslu	Ka Subid	Ka Bid Poldagri	Tim	Kepala Badan	BPKAD	SEKDA	Bupati Bangka	Bank	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Proposal Permohonan Hibah dalam bentuk uang										- Surat Permohonan dengan Kop surat dan berstempel disertakan RAB	1 hari	Berkas permohonan pengajuan	
2.	Penerimaan berkas Proposal Permohonan Hibah dalam bentuk uang										- Surat Permohonan Pencairan Hibah disertakan RAB yang telah disesuaikan berkop dan stempel basah	1 hari	Berkas didisposisi	
3.	Berkas Proposal Permohonan Hibah diproses oleh Kesbangpol Prov. Jateng											2 hari	Berkas turun pada Bidang Pengampu	
4.	Proses Pencermatan RAB usulan Hibah sesuai SHB Jawa Tengah										- Pakta Integritas bermaterai, kop surat dan stempel basah	2 hari	Pencermata RAB yang diusulkan bersama tim Anggaran BPKAD dan BAPPEDA	
5.	Pengajuan Usulan Hibah setelah penyesuaian kebutuhan dan SHB										- Kwitansi bermaterai dan stempel basah.	1 hari	Hasil Penyesuaian RAB usulan Hibah dalam bentuk uang.	
6.	Usulan Hibah dimasukan didalam APBD Kesbangpol Prov. Jateng										- Rekening bank.	Rapat penganggaran	Anggaran Hibah Masuk pada Anggaran OPD Bakesbangpol Kabupaten Bangka	

PELAKSANA											MUTU BARU			
NO.	URAIAN TUGAS	KPU / Bawaslu, TNI Polri dan Parpol	Ka Subid	Ka Bid Poldagri	Tim	Kepala Badan	BPKAD	SEKDA	Bupati Bangka	Bank	Persyaratan	Waktu	Output	KET
7.	Proses Pengajuan SK Bupati tentang Hibah Daerah				 BIRO HUKUM						- Fotocopy KTP dan NPWP - Surat Pernyataan tanggung jawab bermaterial	1 hari	Guna mendapat persetujuan Bupati tentang pemberian Hibah Daerah	
														
8.	Proses Penerbitan NPHD											1 hari	Pengikat perjanjian kesepakatan hibah sesuai Perbub No 7 Tahun 2022	
9.	Permohonan Pencairan Anggaran Hibah disertakan kelengkapan berkas persyaratan		 Bendahara									6 hari	Permohonan pencairan menjadi syarat kelengkapan dokumen dan kelengkapan pendukung untuk pencairan hibah	
10.	Pencairan Hibah dalam bentuk Uang											2 hari	1. Proses Pencairan melalui Bankesbangpol.	

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET
		KPU / Bawaslu, T NI Polri, Parpol	Ka Subid	Ka Bid Poldagri	Tim	Kepala Badan	BPKAD	SEKDA	Gubernur Jawa Tengah	Bank	Persyaratan	Waktu	Output	
11.	Pemberitahuan ke Penerima Hibah											1 hari	Parpol tahu dana masuk ke rek	
10.	Arsip di simpan di Bakesbangpol Kab. Bangka pada Bidang Poldagri												Berkas Arsip permohonan	




 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Bangka,

 MOHD NURSI, S.IP
 PEMBINA TK I/ IV B
 NIP. 19680602 198810 1 1001


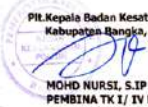


PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(SKKO)
KABUPATEN BANGKA

Jalan Pemuda No 2 Sungailiat

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA</p> <p>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>		NOMOR SOP	: 061.9/002/SOP/KESBANGPOL/2023
		TGL. PEMBUATAN	: Maret 2023
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	:
		DISAHKAN OLEH	 PIH. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka MOHD NURUL, S.I.P. PEMBINA TK I/ IV B NIP. 19680602 198810 1 1001
		NAMA SOP	: Verifikasi kelengkapan berkas SKKO bagi Lembaga/ Ormas
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka	1. Memiliki kemampuan melaksanakan Verifikasi kelengkapan berkas pengajuan SKKO bagi lembaga/ ormas	
2	Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka	2. Memahami tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka 3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme Verifikasi kelengkapan berkas pengajuan SKKO bagi lembaga/ ormas	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
		1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran	
		2. Term of Reference	
		3. Komputer/Printer/Scanner	
		4. Jaringan Internet	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dikeluarkan oleh Kemendagri		- Di simpan sebagai data elektronik dan manual	





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN SURAT IZIN PENELITIAN DAN
SURVEY**

KABUPATEN BANGKA

Jalan Pemuda No 2 Sungailiat

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		NOMOR SOP	: 051.9002/SOP/KE.SBANSFPU/2023
		TGL. PEMBUATAN	: Maret 2023
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	:
		DISAHKAN OLEH	 Pit. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, MOHD NURZI, SJP PEMBINA TK/1/ IV B NIP. 19680602 198510 1 1001
DASAR HUKUM :		NAMA SOP	: Penerbitan Surat Izin Penelitian dan Survey
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka 2. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka		KUALIFIKASI PELAKSANA :	1. Memiliki kemampuan menerbitkan Surat Izin Penelitian dan Survey 2. Memahami tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka 3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme Penerbitan Surat Izin Penelitian dan Survey
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Surat Izin Penelitian dan Survey dapat dikeluarkan apabila telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		- Di simpan sebagai data elektronik dan manual	

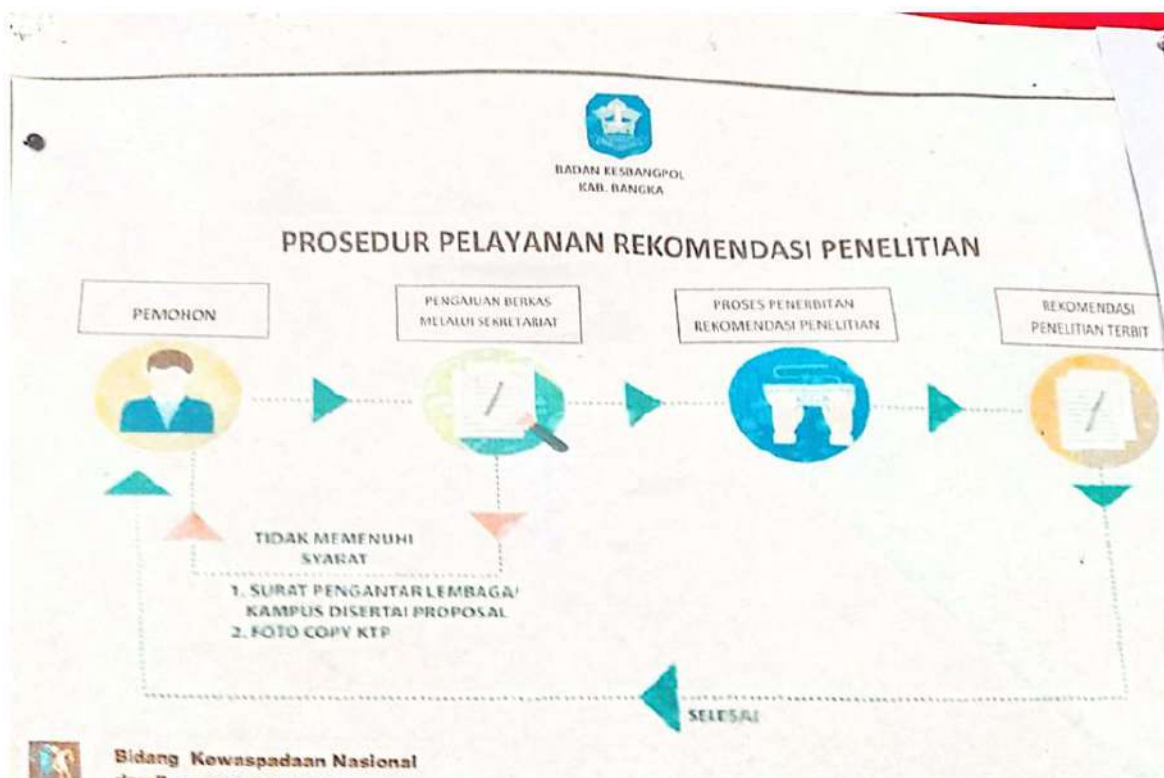
**IDENTIFIKASI SOP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dasar Hukum:	:	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Bangka
Unit Kerja Eselon I	:	-
Unit Kerja Eselon II	:	-
Unit Kerja Eselon III	:	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Kerja Eselon IV	:	Seksi Kewaspadaan Dini Daerah

NO	Tugas	Fungsi	Sub - Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (pasal 5; ayat b)	Meneliti pengajuan izin penelitian dan survey yang diajukan oleh instansi swasta, masyarakat dan perguruan tinggi.	Surat Izin Penelitian dan Survey	Penerbitan	Penerbitan Surat Izin Penelitian dan Survey

Flowchart SOP Penerbitan Izin Penelitian dan Survey

No	Aktivitas	Pelaksanaan						Mutu Baku			
		Kepala Kantor	Kasi Kewaspadaan Diri	Staf	Operator	Bagian Tata Usaha	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke Kantor Kasbangpol Kabupaten Bangla untuk menerbitkan Surat Izin Penelitian dan Survey										
2	Bagian Tata Usaha menerima surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Kantor untuk disposisi							Surat Permohonan dan Berkas Buku Surat Masuk dan ATK	15 menit	Surat Permohonan	
3	Kepala Kantor mendeposikan surat ke Kasi Kewaspadaan Diri Daerah untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan							Surat Permohonan	2 menit	Permohonan Disposisi	
4	Kasi Kewaspadaan Diri Daerah menerima disposisi Kepala Kantor, kemudian memeriksa berkas permohonan. Apabila sudah lengkap diserahkan ke buku register lalu diserahkan ke operator untuk diketik, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi							Disposisi, berkas dan surat permohonan	10 Menit	Konsep, berkas	
5	Pemohon melengkapi dan memperbaiki berkas dan menyerahkan kembali ke Kasi Kewaspadaan Diri Daerah							berkas yang harus dilengkapi berkas yang lebih dilengkapi	20 Menit	berkas yang lengkap	
6	Kasi Kewaspadaan Diri Daerah menerima berkas perbaikan dan menyerahkan ke operator untuk diketik							Konsep	15 menit	Konsep	
7	Operator mengetik Surat izin sesuai dengan data yang disampaikan pemohon lalu diserahkan ke Kasi Kewaspadaan Diri Daerah untuk diteliti dan dikoreksi							Konsep	1 Jam	Surat izin	
8	Kasi Kewaspadaan Diri Daerah mengoreksi konsep surat izin Penelitian, memberi paraf lalu menyerahkan ke Bagian Tata Usaha untuk ditanda tangani Kepala Kantor							Surat izin	30 Menit	Surat izin	
9	Bagian Tata Usaha menerima surat dan menyerahkan ke Kepala Kantor untuk ditanda tangani							Surat izin	10 Menit	Surat izin	
10	Kepala Kantor menandatangani surat dan menyerahkan ke bagian Tata Usaha untuk diberi stempel							Surat izin	10 Menit	Surat izin	
11	Bagian Tata Usaha memberi stempel dan menyerahkan ke staf Kewaspadaan Diri Daerah untuk di register							Surat izin	5 Menit	Surat izin	
12	Staf Seksi Kewaspadaan Diri Daerah meregister Surat izin dan menyerahkan ke Kasi Kewaspadaan Diri Daerah							Surat izin dan Buku Register	10 Menit	Surat izin	
13	Kasi Kewaspadaan Diri Daerah menyerahkan ke pemohon							Surat izin	5 Menit	Surat izin	
14	Pemohon menerima Surat Izin Penelitian dan Survey							Surat izin			



REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	69,00			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	25.50	25.50	100%	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	11.25	11.25	100%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Persen	100 %	100 %	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100%	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Persen	0.00	0.00	100%	

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Orang</i>	16	16	100%	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	12	12	100%	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Laporan</i>	42	42	100%	
		Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai	64.80	64.80	100%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Persen	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Persen	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	43.48%	43.48%	100%	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	Paket	0	0 Paket	0%	
	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Orang	2	2 Orang	100%	

		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai	3.00	3.00	100%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	Persen	100%	100%	100%	
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan	12	12	100%	
	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Dokumen	12	12	100%	
	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Dokumen	12	12	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Laporan	12	12	100%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	laporan	12	12	100%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan	12	12	100%	
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100%	100%	100%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase penambahan aset perangkat daerah	Persen	21.31%	21.31%	100%	

	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100%	2 Unit Rasionalisasi
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen	45.90%	45.90%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	2 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100%	
2		Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	Persen	80%	69%	89%	
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	80 %	80 %	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100%	100%	100%	

	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan</i>	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	Orang	60 Orang (30 orang Laki-laki dan 30 orang Perempuan)	60 Orang (30 orang Laki-laki dan 30 orang Perempuan)	100%	
3		Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	Persen	70%	68.00%	97,14%	
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	Persen	100%	100%	100%	
			Persentase pemilih pemula disatukan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	Persen	0.00%	0.00%	0%	Rasionalisasi Anggaran
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula	Persentase satuan Pendidikan menengah yang siswanya mendapatkan pendidikan Politik	Persen	0%	0%	0%	Rasionalisasi Anggaran
		Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	Persen	100%	100%	100%	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi</i>	<i>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,</i>	Orang	206.805 Orang Pemilih pada PEMILU/PILKADA	206.805 Orang Pemilih pada PEMILU/PILKADA	100%	

	<i>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		12 Parpol	12 Parpol	100%	
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	Laporan	1	1	100%	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	Persentase Ormas yang aktif	Persen	100%	100%	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi	Persen	33.33 %	33.33 %	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	40	40	100%	
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100%	

	SOSIAL, DAN BUDAYA							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan	Persen	100	100	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebjakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang/Forum	1	1	100%	
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100%	100%	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan Desa/Kelurahan yang dilakukan pembinaan	Persen	100%	100%	100%	
			Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	Persen	12.35%	12.35%	100%	

	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	Laporan	<i>1 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	<i>1 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	100%	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dokumen	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	100%	